

Disertasi Revisi Iman Sutarya

DIS

by MKnHerny Indriyati

Submission date: 22-Nov-2023 08:02PM (UTC-0600)

Submission ID: 2236553687

File name: Disertasi_bab1,4,_dan_5_iman_Sutarya.pdf (1.07M)

Word count: 17355

Character count: 113836

**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
LINK AND MATCH SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DENGAN INDUSTRI DAN DUNIA
KERJA DI KABUPATEN TANGERANG**

*POLICY IMPLEMENTATION STRATEGY
LINK AND MATCH VOCATIONAL HIGH SCHOOLS WITH INDUSTRY
AND THE WORLD OF WORK IN TANGERANG DISTRICT*

DISERTASI

**Disusun dalam Rangka Memenuhi Syarat Guna Mengikuti
Ujian Naskah Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial
Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Pasundan**

Oleh:
IMAN SUTARYA
189020018



**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
BIDANG KAJIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengangguran merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan peningkatan pemerataan pendapatan, yang menjadi tanda peningkatan kesejahteraan penduduk. Pengangguran merupakan masalah yang dihadapi hampir oleh seluruh negara berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran terbuka pada bulan Pebruari tahun 2021 sebesar 6,62%, menurun 0,81 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Angka ini tentu saja bukan angka yang menguntungkan, walaupun menurun dari tahun lalu, karena bagaimanapun jumlah pengangguran menunjukkan ketidakberhasilan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu karakteristik dari pengangguran di Indonesia adalah tingginya pengangguran dengan pendidikan tinggi atau disebut dengan pengangguran terdidik. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional 2021 pengangguran di Indonesia didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan sekolah menengah atas (baik umum maupun kejuruan) dan pendidikan tinggi (sarjana dan diploma).

Fenomena ini menjadi sebuah ironis mengingat bahwa berarti semakin tinggi pendidikan seseorang, probabilitas atau kemungkinan seseorang menjadi

penganggur pun semakin tinggi. Dengan kata lain, pendidikan yang didapatkan oleh angkatan kerja tidak menjamin untuk diserap oleh dunia industri. Faktor penting yang melatarbelakangi fenomena pengangguran terdidik ini adalah transisi yang panjang antara pendidikan dan pasar kerja.

14 Tabel 1
Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi	2020		2021
	Februari	Agustus	Februari
Tidak/Belum Sekolah	35.761	31.379	20.461
Tidak Tamat SD	346.778	428.813	342.734
SD	1.006.744	1.410.537	1.219.494
SMP	1.251.352	1.621.518	1.515.089
SMU	1.748.834	2.662.444	2.305.093
SMK	1.443.522	2.326.599	2.089.137
Akademi/Diploma	267.583	305.261	254.457
Universitas	824.912	981.203	999.543
Total	6.925.486	9.767.754	8.746.008

Sumber: BPS (2021)

5 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengangguran di Indonesia disumbang paling tinggi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan. Dari tahun ke tahun, posisi Sekolah Menengah Kejuruan sebagai penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia belum dapat dicarikan solusinya.

Terlebih lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal 2020. Berbagai hal terjadi akibat pandemi COVID-19 pada sektor ritel, sektor pariwisata, sektor manufaktur dan sektor lainnya sangat berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja di Indonesia, yang berimbas pada tidak tertampungnya angkatan kerja sejak tahun 2020, termasuk di dalamnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan. Kondisi tersebut menambah tajam kondisi gap antara *supply* dan *demand* tenaga kerja Sekolah Menengah Kejuruan.

7
Tabel 2

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (dalam persentase)

Provinsi	2020		2021
	Februari	Agustus	Februari
ACEH	5,40	6,59	6,30
SUMATERA UTARA	4,71	6,91	6,01
SUMATERA BARAT	5,25	6,88	6,67
RIAU	4,92	6,32	4,96
JAMBI	4,26	5,13	4,76
SUMATERA SELATAN	3,90	5,51	5,17
BENGKULU	3,08	4,07	3,72
LAMPUNG	4,26	4,67	4,54
KEP. BANGKA BELITUNG	3,35	5,25	5,04
KEP. RIAU	5,98	10,34	10,12
DKI JAKARTA	5,15	10,95	8,51
JAWA BARAT	7,71	10,46	8,92
JAWA TENGAH	4,20	6,48	5,96
DI YOGYAKARTA	3,38	4,57	4,28
JAWA TIMUR	3,60	5,84	5,17
BANTEN	7,99	10,64	9,01
BALI	1,25	5,63	5,42
NUSA TENGGARA BARAT	3,04	4,22	3,97
NUSA TENGGARA TIMUR	2,64	4,28	3,38
KALIMANTAN BARAT	4,47	5,81	5,73
KALIMANTAN TENGAH	3,33	4,58	4,25
KALIMANTAN SELATAN	3,67	4,74	4,33
KALIMANTAN TIMUR	6,72	6,87	6,81
KALIMANTAN UTARA	5,71	4,97	4,67
SULAWESI UTARA	5,34	7,37	7,28
SULAWESI TENGAH	2,93	3,77	3,73
SULAWESI SELATAN	5,70	6,31	5,79
SULAWESI TENGGARA	3,10	4,58	4,22
GORONTALO	3,29	4,28	3,41
SULAWESI BARAT	2,39	3,32	3,28
MALUKU	6,71	7,57	6,73
MALUKU UTARA	4,09	5,15	5,06
PAPUA BARAT	6,78	6,80	6,18
PAPUA	3,42	4,28	3,77
Indonesia	4,94	7,07	6,26

Sumber: Badan Pusat Statistik (Agustus, 2021)

Berdasarkan ⁵ tabel di atas diketahui bahwa penyebaran pengangguran di Indonesia merata hampir di seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang menjadi langganan penyumbang pengangguran di Indonesia adalah Provinsi Banten. Kondisi Provinsi Banten yang menjadi penyumbang pengangguran di Indonesia sangat ironis, mengingat Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan merupakan penyangga Ibu Kabupaten, dan memiliki potensi industri yang cukup tinggi.

Provinsi Banten mendulang angka pengangguran di tahun 2021 sebesar 8,98%, dengan sebaran berdasarkan wilayah sebagai berikut:

Tabel 3
Persentase Angka Pengangguran Terbuka Provinsi Banten Menurut Wilayah Kabupaten/Kabupaten

Wilayah	Tahun & Angka TPT			
	2018	2019	2020	2021 (Agst)
Kab Pandeglang	8,19	8,67	9,15	7.7
Kab Lebak	7,57	7,96	9,63	7.86
Kab Tangerang	9,63	8,92	13,06	9.06
Kab Serang	12,63	10,58	12,22	10.58
Kota Tangerang	7,39	7,14	8,63	9.07
Kota Cilegon	9,21	9,64	12,69	10.13
Kota Serang	8,10	8,07	9,26	9.41
Kota Tangerang Selatan	4,67	4,78	8,48	8.6
Provinsi Banten	8,47	8,11	10,64	8.98

Sumber: BPS 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penyebaran pengangguran di Provinsi Banten merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten dan Kabupaten, wilayah dengan angka pengangguran tertinggi pada tahun 2020 adalah Kabupaten Tangerang dan angka pengangguran terendah adalah Kabupaten Tangerang Selatan. Angka ini telah menurun 1, 63% dari tahun sebelumnya 2020 yang

meroketkan angka pengangguran karena dampak Pandemi Covid-19. Namun angka tersebut tetap belum memuaskan. Pada tabel di atas juga terdapat wilayah yang pada tahun 2020 menjadi wilayah dengan angka pengangguran tertinggi di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Tangerang. Jika dilihat, Kabupaten Tangerang merupakan bagian dari wilayah besar Tangerang Raya, selain Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan, yang merupakan Kabupaten penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, dan termasuk wilayah dengan jumlah Industri terbesar. Maka kondisi ini menjadi sebuah ironi, karena jumlah pengangguran tertinggi justru terdapat pada wilayah dengan jumlah industri yang besar.

Angka pengangguran yang tinggi di Kabupaten Tangerang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam salah satu penelitian disertasi bahwa rendahnya penyerapan siswa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Banten termasuk di dalamnya Kabupaten Tangerang adalah dikarenakan pelaksanaan *teaching factory* sebagai model pembelajaran Sekolah Menengah tidak terlaksana dengan efektif, disebabkan penguatan individu, organisasi dan sistem yang tidak maksimal. (Resmiati, 2021:12).

Selain itu, penyebab tingginya angka pengangguran terdidik dapat dijelaskan dari berbagai aspek, salah satu diantaranya adalah adanya ketidakselarasan (*mismatch*) antara *supply* tenaga kerja dan *demand* dunia usaha (industri). Masalah kesenjangan merupakan masalah lama yang masih belum terselesaikan secara tuntas. Kesenjangan (*mismatch*) adalah ketidaksesuaian/ketidakcocokan antara kualifikasi pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Pholpirul (2017) mengatakan bahwa ketidaksesuaian semacam itu

mencerminkan ketidakefisienan di institusi pendidikan kejuruan, termasuk sekolah kejuruan dan universitas.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Hanafi (2012) dan Muhson, dkk (2012) bahwa hal yang menimbulkan *mismatch* adalah pendidikan kejuruan tidak cukup fleksibel dalam merespons permintaan dunia kerja dan industri, sehingga timbul ketidakmampuan lembaga pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan realitas tuntutan dunia industri yang sangat maju dengan pesatnya.

Salah satu strategi yang dikerahkan oleh kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan antara lain adalah dengan kebijakan *Link and match* pendidikan Kejuruan yang di inisiasi pemerintah sejak tahun 1990 dengan perumusan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990, tepatnya pasal 29 ayat 2, terkait instruksi untuk mempersiapkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tenaga siap kerja, yang merupakan dasar perancangan konsep *link & match*. Kemudian di Era Presiden Jokowi, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Instruksi Presiden diikuti dengan Permenperindag nomor 34 tahun 2017 tentang Pendidikan Vokasi. Sementara itu untuk merealisasikan Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan kebijakan nomor 39 tahun 2022 tentang Pendidikan Vokasi dengan harapan capaian kompetensi lulusan Pendidikan Kejuruan sesuai dengan kebutuhan industri.

Seiring dengan diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang tersebut mengamanatkan kewenangan pengelolaan SMA

(Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/Kabupaten diserahkan ke pemerintah provinsi. Di Provinsi Banten program pendidikan vokasi *link and match* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan industri mulai digulirkan pada tahun 2018, diluncurkan pada tanggal 5 Maret 2018 oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan didampingi oleh Wakil Gubernur Provinsi Banten. Regulasi tersebut juga diterapkan pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Tangerang.

Provinsi Banten yang secara perekonomian ditopang oleh industri manufaktur dengan kontribusi hampir 50% terhadap PDRB. Sub-Sektor industri yang paling dominan yaitu industri baja dan industri petrokimia, dari industri hulu hingga hilir.(Banten dalam Angka, 2018). Dengan potensi yang tinggi, seharusnya bukan hal yang sulit untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia di Provinsi Banten. Namun pada kenyataannya, tingkat pengangguran di Provinsi Banten masih tinggi, bahkan tertinggi kedua di Indonesia. Kabupaten Tangerang merupakan daerah otonom dan merupakan salah satu Kabupaten industri dan memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Banten.

Berdasar pada fenomena tersebut, peneliti melihat adanya permasalahan yang perlu untuk dianalisa, mengapa implementasi program *link and match* yang telah sedemikian ideal, ditambah dengan potensi daerah yang mendukung, namun pada kenyataannya tidak efektif mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Tangerang. Maka penelitian akan membahas secara mendalam terkait strategi Implementasi Kebijakan *Link and match* dalam pengentasan pengangguran di Kabupaten Tangerang, berdasarkan sudut pandang kebijakan publik.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan *Link & Match* pendidikan kejuruan. Adapun subfokus dalam penelitian ini ditekankan pada dimensi dimensi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Goggin, *et al* (1990) dengan tiga unsur implementasi kebijakan yaitu isi pesan, bentuk pesan dan persepsi terhadap pimpinan. Unsur unsur tersebut kemudian direfleksikan pada kebijakan *link and match* pendidikan kejuruan dengan Industri dan dunia usaha.

1.1.1 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena empiris dan gagarsan peneliti terhadap teori penguatan kelembagaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *link and match* Sekolah Menengah Kejuruan dengan Industri dan dunia usaha di Kabupaten Tangerang?
2. Apa yang menjadi penghambat implementasi kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan dengan Industri dan dunia kerja di Kabupaten Tangerang tidak efektif?
3. Bagaimana strategi implementasi kebijakan *Link and match* yang efektif dalam rangka peningkatan keterserapan tenaga kerja SMK di Kabupaten Tangerang?

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan *link and match* Sekolah Menengah Kejuruan dengan Industri dan dunia usaha di Kabupaten Tangerang.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan dengan Industri dan dunia usaha di Kabupaten Tangerang tidak efektif.
3. Menemukan strategi implementasi kebijakan *Link and match* yang efektif dalam rangka peningkatan keterserapan tenaga kerja SMK di Kabupaten Tangerang.

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ditujukan untuk menegaskan manfaat yang dapat dihasilkan setelah penelitian dilakukan. Hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi baik secara teoritis bagi kalangan akademisi maupun secara praktis bagi perumus dan pelaksana kebijakan.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperoleh penemuan baru, atau terbarukan dari ilmu kebijakan publik, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yakni Ilmu Sosial, khususnya pada konsep implementasi kebijakan dan konsep *link and match*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan sebagai alternatif kebijakan bagi perumus dan pelaksana kebijakan dalam rangka meningkatkan angka keterserapan tenaga kerja terdidik khususnya melalui program *link and match* SMK dengan IDUKA di Kabupaten Tangerang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan tentang implementasi kebijakan *link and match* dengan menjajikan data exsisting, data hasil pengamatan dan observasi pada ⁵sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Tangerang, hasil penelitian tentang penyebab ketidakefektifan kebijakan *link and match* dan strategi untuk mengoptimalkan kebijakan *link and match* SMK dengan dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Tangerang.

2.1 Hasil Penelitian

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kondisi eksisting kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri dan Dunia Usaha Di Kabupaten Tangerang. Pada bagian ini akan dikemukakan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mencakup perencanaan program, mekanisme pelaksanaan program, dan mekanisme pembiayaan program.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program Pendidikan secara yuridis formal telah tercantum dalam Undang undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dimana dalam beberapa pasal tersurat bahwa masyarakat dapat terlibat dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengevaluasi program dan hasil pendidikan lebih berkualitas. Begitu pula

halnya dengan program Kerjasama dalam menyelenggarakan Pendidikan , termasuk Kerjasama SMK dengan DU/DI.

Besarnya investasi dalam penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan SMK, dan banyaknya jumlah SMK, sehingga tidak memungkinkan semua SMK memiliki fasilitas pendidikan yang ideal seiring dengan tuntutan kualitas yang *link and match*. Kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha/dunia industri merupakan hal yang tepat seiring dengan hakikat Pendidikan kejuruan. Menurut Djojonegoro (1998) ada tiga diantaranya yang berhubungan dengan urgensi Kerjasama antara Pendidikan kejuruan dengan dunia usaha/dunia industri antara lain: (1) Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replikasi lingkungan dimana ia akan bekerja, (2) Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditempatkan ditempat kerja, dan (3) Pendidikan kejuruan akan efektif apabila gurunya telah mempunyai pengalaman yang berhasil dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan mengenai operasi dan proses.

Oleh karena itu kebijakan *Link and match* adalah kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang dilaksanakan demi memberikan peningkatan relevansi SMK dengan keperluan permintaan pasar kerja. *Link and match* berarti adanya saling keterkaitan dan kesetaraan antara pendidikan dan industri dalam hal pemenuhan kebutuhan dan permintaan terkait kompetensi tenaga kerja. Jadi, antara dunia pendidikan dan dunia industri harus bekerjasama untuk menjalankan program *link and match* ini. Teori kecocokan-pekerjaan (*job-match*)

kecocokan antara pengetahuan, keahlian dan kemampuan (*skill*) masing-masing individu dengan tuntutan pekerjaan (*demand minded*). *Link and match* sebagai upaya meningkatkan sistem pendidikan dan pelatihan yang menghubungkan antara sekolah dan industri. Ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Pentingnya keterampilan seperti komunikasi, negosiasi dan persuasi dalam persaingan pasar kerja.

Masalah *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia industri telah menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang setiap periode pemerintahannya. *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Kabupaten Tangerang dengan dunia usaha dan dunia industri, didasari oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menaruh perhatian lebih terhadap permasalahan adanya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan, dengan kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Sejak tahun 1989 kebijakan *link and match* ini sudah digulirkan dengan harapan kompetensi lulusan relative setara dengan kompetensi yang dibutuhkan industri atau dunia kerja. Perkembangan kebijakan tersebut mengalami perbaikan terus menerus baik menyangkut perbaikan sarana prasarana, kurikulum, kemitraan dengan industri dan pembiasaan siswa, guru dan kepala sekolah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menerus memperbaiki mutu lulusan sekolah,

khususnya sekolah kejuruan. Terlebih setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi Pendidikan vokasi. Sebagai tantangan yang wajib dihadapi yang mendasar adanya revitalisasi bagi sekolah vokasi menurut Wikan (2020) yaitu; (1) penyediaan sarana-rasarana, (2) kualitas dan jumlah guru, (3) otonomi atau politik daerah, (4) pertumbuhan teknologi, (5) pergantian pola kerja, (7) perkembangan penduduk, dan (8) konsep keunggulan local. Kaitan dengan otonomi dan politik daerah, Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2022 tentang Pendidikan Vokasi atau Pendidikan Sekolah Mengah Kejuruan, sebagai implementasi dari Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Sementara itu kaitannya dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya ada pasal yang memuat tentang bursa kerja khusus (BKK). Realisasi dari Perda ini adalah Pemerintah daerah memfasilitasi SMK yang ada diwilayahnya untuk membuat BKK, dibawah naungan Disnaker.

Kebijakan Program *link and match* SMK dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, mengingat output Pendidikan sekolah kejuruan sesungguhnya merupakan Angkatan kerja di Kabupaten/Kota. Sehingga keberhasilan Kerjasama antara Pemerintah melalui Disnaker, Sekolah Kejuruan dengan DU/DI akan berdampak positif dalam mengurangi angka pengangguran. Kebijakan *Link & Match* SMK dengan Dunia Industri dilakukan dengan berbagai kegiatan, diantaranya dengan diselenggarakannya penyuluhan Bimbingan Karir bagi siswa Sekolah Kejuruan,

yang mengagendakan untuk mempertemukan dunia pendidikan dengan kalangan industri secara berkala. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memaksimalkan *Link & Match* Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Tangerang dengan dunia industri sehingga terjadi kesesuaian antara output yang dikeluarkan oleh Sekolah Kejuruan yaitu lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja yang berbasis *skill* yang dibutuhkan oleh dunia industri.

Kabupaten Tangerang adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Banten, dengan jumlah SMK sebanyak 195 Sekolah yang terdiri dari SMK Negeri sebanyak 12 Sekolah, dan SMK Swasta sebanyak 183 sekolah. Dengan jumlah sekolah kejuruan yang relative banyak, serta fasilitas dan sarana yang berbeda-beda, sehingga membangun kerjasama sekolah kejuruan dengan dunia usaha/dunia industri akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas lulusan.

Sebagian besar sekolah kejuruan yang ada di Kabupaten Tangerang telah melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri, serta intansi vertical maupun horizontal dalam penyelenggaraan pendidikannya. Bentuk kerjasama nyata antara SMK dengan DU/DI menurut Try Riyanto (1994) dikenal tiga macam antara lain; *cooporative work education* di Indonesia dikenal (PKL), magang, dan Kerjasama institusi pasangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hampir semua SMK Negeri dan Swasta melaksanakan kegiatan PKL untuk semua siswa kelas 11 Kurikulum 2013, sedangkan kurikulum merdeka dilaksanakan kelas 12 dengan durasi waktu berbeda-beda tergantung kesepakatan antara pihak sekolah dengan mitra sekolahnya.

Idealnya kegiatan PKL atau prakerin bisa dilaksanakan selama 1 semester untuk setiap siswa, dengan tempat pelaksanaannya adalah dunia usaha/dunia industri yang relevan dengan kompetensi keahliannya. Namun demikian masih banyak ditemukan tempat PKL atau Prakerin tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya, sehingga kegiatan prakerin belum banyak meningkatkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai prasyarat yang dibutuhkan dunia kerja. Bahkan pelaksanaan prakerin banyak dijumpai di instansi pemerintah, dari mulai tingkatan kelurahan, kecamatan, dan lain-lain yang ada dipusat pemerintahan.

2.1.1 Perencanaan Program *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan solusi dalam mengatasi tingginya pengangguran yang disebut Super *Link and match* 8+i. Kebijakan lanjutan itu bertujuan lebih mengoptimalkan peran kemitraan antara lembaga pendidikan dengan industri, atau kemitraan antara sekolah vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan harapan tidak terjadi kesenjangan antara capaian kompetensi lulusan, dengan kompetensi yang diinginkan Industri.

Implementasi dari kebijakan lanjutan *Link and match* masuk kedalam beberapa program Kemendikbud. Beberapa program yang telah terlaksana dan tahap lanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah dan lulusan, diantaranya program Sekolah Pusat Keunggulan, Program SMK PK Sekema Pemandangan dengan Industri, Program Sekolah berbasis Industri 4.0. Program-program tersebut merupakan program unggulan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan sejak diluncurkannya Program Revitalisasi SMK pada tahun 2016, melalui Intruksi Presiden. Sementara itu Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Tangerang yang memperoleh bantuan program tersebut dipaparkan pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel di atas, tidak semua sekolah SMK Negeri di Kabupaten Tangerang merupakan sekolah yang memperoleh bantuan pengembangan dari Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (DitPSMK). Oleh karena itu tentu dari sisi kualitas penyelenggaraan, sekolah tersebut berbeda. Adapun tujuan-tujuan dari program tersebut menurut Saryadi (2022) antara lain: (1) SMK sebagai pusat keunggulan (SMK PK) memiliki tujuan mewujudkan transformasi, sehingga sekolah memiliki kinerja dan kualitas yang optimal melalui kemitraan dan penyesuaian yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia usaha dan dunia industri, dengan harapan lulusan dapat diserap; bentuk bantuan yang diperoleh bantuan fisik berupa ruang praktik siswa, peralatan praktek, dan pembelajaran; (2) SMK berbasis industri 4.0 memiliki tujuan dalam rangka pengembangan kompetensi keahlian SMK berbasis digitalisasi pada proses penguatan pembelajaran dan atau pemenuhan peralatan praktik, atau pengembangan ruangan praktik siswa berbasis industri 4.0; dan (3) SMK PK sekema pepadanan merupakan program yang mengedepankan semangat kolaborasi Pendidikan vokasi dengan Industri, dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan yang dilaksanakan secara komprehensif bersama industri.

2.1.2 Mekanisme pelaksanaan Program *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang

Langkah langkah pelaksanaan program *link and match* SMK dengan Industri di Kabupaten Tangerang, dijelaskan sebagai pada tabel 17, berisi tentang daftar sekolah yang telah melakukan sinkronisasi kurikulum, prakerin, magang guru, guru tamu dari industri, mengembangkan tefa (teachin factory) maupun melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Keahlian pada kelas 12, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam tabel 17, diperoleh informasi bahwa Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SMKN/S sebagian besar disusun oleh tim sekolah, yang di validasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Idealnya kurikulum disusun dengan melibatkan unsur industri, dengan harapan kurikulum hasil sinkronisasi tersebut dapat menggambarkan kebutuhan-kebutuhan kompetensi yang diharapkan oleh industri. Dari sebanyak 195 SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Tangerang, hanya beberapa sekolah yang telah melakukan sinkronisasi kurikulum dengan industri terutama sekolah yang sedang menerima bantuan SMK Pusat Keunggulan, SMK PK pepadanan, dan SMK berbasis Industri 4.0. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang telah melakukan sinkronisasi kurikulum, harus menjadi sekolah pengimbas, bagi sekolah yang belum melakukan sinkronisasi kurikulum dengan industri.

1. Sertifikasi Kompetensi

Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan ialah bagian yang cukup penting, baik melalui pendidikan resmi semacam pendidikan Vokasi ataupun

pelatihan semacam kursus – kursus lembaga pelatihan kerja (BLK). Untuk melahirkan serta meningkatkan kemampuan dan keahlian baru. Harus menuntut diadakannya corak pembelajaran dan latihan baru pula, pergantian tidak hanya terjadi di dalam struktur lapangan kerja, namun juga dalam sistem pendidikan. Bentuk sertifikat kompetensi yang dimaksud adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Adapun di Kabupaten Tangerang dari sekitar 195 sekolah yang telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi pada kompetensi tertentu, hanya beberapa sekolah saja antara lain; SMK Negeri 4 Kabupaten Tangerang, SMKN 5 Kabupaten Tangerang dan SMKN 7 Kabupaten Tangerang.

2. Pembelajaran Berbasis Project Rill Dari DU/DI

Proses pembelajaran berbasis project rill adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Dalam proses pembelajaran tersebut, untuk ranah pembelajaran produktif PBL sangat mendukung untuk proses pembelajaran berbasis produk. Apabila terus dilakukan maka proses pembelajaran ini akan mendukung proses taching factory.

3. Praktik Kerja Industri atau Magang

Pemagangan termasuk metode yang paling efektif demi mempersiapkan calon pekerja agar siap langsung terjun ke dunia kerja. Program *link and match* di Kabupaten Tangerang mengharuskan peserta didik melakukan praktek kerja industri atau magang di industri. Program rakrin atau praktek kerja industri telah tercantum dalam struktur kurikulum SMK, dengan durasi waktu 600 jam

pembelajaran, atau setara dengan 1 semester. Adapun pelaksanaan prakerin, ada pada semester 4 untuk kurikulum 2013, dan semester 5 untuk kurikulum merdeka. Dalam penjabarannya kegiatan praktek kerja industri, atau parakerin merupakan kegiatan wajib yang tertuang dalam kurikulum. Diperlihatkan pada Tabel 17, bahwa kegiatan siswa untuk sekolah menengah kejuruan wajib mengikuti kegiatan tersebut, yang berlangsung maksimal 6 bulan atau 1 semester.

4. Potensi SMK di Bursa Tenaga Kerja

Potensi lulusan SMK yang menjadi perhatian dalam kebijakan *link and match* SMK dengan dunia industri di Kabupaten Tangerang meliputi keterampilan, kesempatan kerja, produktivitas, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru.

a) Keterampilan

Pertumbuhan industri di Kabupaten Tangerang yang cepat, wajib diiringi dengan kenaikan mutu SDM. Penyesuaian keahlian pada lulusan SMK dibutuhkan agar sejalan dengan kualifikasi industri. Oleh karena itu, keterampilan merupakan aset yang berarti untuk pribadi, industri, serta khususnya masyarakat dalam masa globalisasi.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, keahlian lulusan SMK di Provinsi Banten hanya mendominasi pada lulusan SMA, sedangkan untuk TKA, Diploma dan Bersertifikat masih lebih tinggi. Artinya, keahlian lulusan SMK lebih rendah daripada lulusan SMA. Tetapi, SMK mempunyai kompetensi hanya 6 persen lebih tinggi dari lulusan diploma. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi lulusan

SMK bagi sebagian industri khususnya di Kabupaten Tangerang masih terbilang rendah.

b) Kesempatan Kerja

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk menciptakan lulusan yang siap kerja, mandiri, dan sanggup membangun negeri terutama dalam aspek perekonomian. Sehingga, pendidikan kejuruan wajib membawa lulusannya dapat bekerja dan mandiri (wirausaha). Agar lulusan SMK di Kabupatenn Tangerang mendapatkan peluang kerja yang besar, perlu adanya peningkatan standar kualitas lulusan secara bertahap. Peningkatan telah dilakukan melalui kerjasama lembaga pendidikan (sekolah) dengan industri.

c) Produktivitas

Lulusan SMK di Provinsi Banten masih mampu bersaing dengan lulusan lain seperti Diploma, TKA, dan orang-orang bersertifikat. Bahkan lulusan SMK produktivitasnya jauh di atas lulusan SMA. Berarti SMK di Provinsi Banten selaku pencetak tenaga kerja yang siap kerja dengan bekal keahlian dan pengetahuan bisa bersaing dalam perihal produktivitas dengan lulusan lain. Sehingga, dapat dikatakan lulusan SMK layak terjun ke dunia kerja. Produktivitas yang baik, merupakan faktor penting bahwa tenaga kerja menunjukkan etos kerja yang baik, sehingga mempengaruhi mutu SDM dalam industri.

Kabupaten Tangerang sebagai kota besar diperlukan fokus mempersiapkan hal-hal yang mendukung pembangunan seperti peningkatan daya saing tenaga kerja. Hal tersebut berfungsi untuk mendukung kemajuan dan mengejar ketertinggalan dari kota lainnya.

d) Kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kota penyangga Ibu Kota Negara, maka pertumbuhannya sejalan dan searah dengan pertumbuhan Kota Besar. Lulusan SMK harus dapat menyesuaikan keterampilan dengan teknologi canggih yang dibutuhkan oleh industri terkini agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Kerjasama antara Sekolah Menengah Kejuruan dan dunia industri di Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Tangerang dengan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pola *link and match* yang diterapkan pada Sekolah Menengah Kejuruan dan Industri di Kabupaten Tangerang merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada unit analisis yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan dunia industri di Kabupaten Tangerang, pola *link and match* yang dilaksanakan oleh SMK dengan dunia industri hampir seluruhnya sama, diantaranya dengan pola training model.

Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa pola atau model *link and match* yang diterapkan pada Sekolah Menengah Kejuruan dan dunia industri, adalah training model atau pelatihan. Demikian juga yang telah dilakukan dalam program kemitraan antara SMK Negeri dan swasta dengan dunia industri di Kabupaten Tangerang.

Model *link and match* ini dinamakan dengan program prakerin (praktek kerja industri). Prakerin merupakan salah satu program yang di gagas oleh Sekolah Menengah Kejuruan sebagai salah satu bentuk kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia industri. Prakerin dilaksanakan dengan berdasar pada kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang menjadi landasan pelaksanaan praktek kerja industri, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Re√italisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Permen Perindustrian No. 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link and match* dengan Industri, dan Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

Selain kepada peserta didik, pelatihan atau pemagangan juga diberikan kepada guru kejuruan sebagai upaya peningkatan keterampilan guru. *link and match* SMK dengan DUDI dilakukan dengan model *on the-job training* yaitu pelatihan dalam jabatan (*ad hoc*) yang dijadwalkan secara rutin dengan sistem pelatihan dan kunjungan (*the training and Visit T & V*).

Pola ini telah berlangsung sangat lama, prakerin telah menjadi kegiatan wajib dan menjadi salah satu syarat kelulusan bagi setiap siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Kabupaten Tangerang. Namun pelaksanaan prakerin masih dianggap belum efektif mengurangi *gap* yang terjadi pada

kompetensi siswa SMK, hal tersebut ditunjukkan dengan masih ⁵tingginya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang yang masih di dominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan.

2.1.3 Mekanisme Pembiayaan Program ⁹*Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang

Sumber daya yang menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu program adalah anggaran. Suatu program akan berhasil maksimal bila ditunjang dengan ketersediaan, kemudahan dan pengalokasian anggaran yang tepat (Van Horn & Van Meter, 1975). Sementara Edward III (1980) secara tegas menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap kondisi anggaran dalam program kebijakan kemitraan SMK dan dunia industri di Kabupaten Tangerang, penganggaran program kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) bersumber dari APBD dialokasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pendanaan *link and match* di atur dalam Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Vokasi Nomor 05 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitas Kemitraan Dan Penyelarasan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Tahun 2020. Peraturan ini baru

diluncurkan pada bulan Juni tahun 2020. Sebelumnya pendanaan program kemitraan dilaksanakan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dalam Pasal 5, Pasal 11 ayat (2) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (7). Pada tingkat Provinsi sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan menengah termasuk Sekolah Menengah Kejuruan, penganggaran program *link and match* dibebankan pada BOSDA

Dalam pelaksanaannya di lapangan, masing masing sekolah tidak ditemukan kendala dan masalah berarti terkait dengan anggaran, pengadaan peralatan untuk kemitraan diakses melalui SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2019 tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).

Adapun pembiayaan dalam pelaksanaan Kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan dengan Industri terdiri dari; Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Industri, Sinkronisasi Kurikulum SMK dengan Industri, Guru Tamu dari Industri, kegiatan Bursa Kerja Khusus, Magang guru dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan jalinan kemitraan antara SMK dengan Industri.

2.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, hasil penelitian terhadap data eksisting ditemukan

2.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian Berdasarkan Data Eksisting.

Berdasarkan pemaparan pada data eksisting di atas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tangerang Sebanyak 195 Sekolah yang terdiri dari SMK Negeri Sebanyak 12 Sekolah, dan SMK Swasta sebanyak 183 sekolah, yang berlokasi di 29 Kecamatan. Sementara itu, untuk sekolah yang memperoleh bantuan dari Kemendikbud pada program SMK Pusat keunggulan, SMK PK Sekema Pemandaran, dan SMK berbasis Industri 4.0. Berdasarkan hasil penelitian untuk Sekolah Negeri yang memperoleh bantuan sebanyak 7 Sekolah antara lain SMKN 1, 4, 5, 7, 8 dan 12, sedangkan untuk sekolah swasta hanya enam sekolah yang memperoleh bantuan SMK Pusat Keunggulan yakni; SMKS Jaya Buana, SMKS Wipama Cikupa, SMKS Peramata Kemiri, SMKS Al Badar, SMKS Mutiara Bangsa, dan SMKS Islamic Vilage, sedangkan sisanya belum memperoleh bantuan.

Apabila memperhatikan skema lanjutan dari program link and match yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat, banyak sekolah yang belum mampu melaksanakannya, antara lain: (a) Kurikulum disusun bersama sekolah dengan industri; (b) jumlah dan peran guru/instruktur dari industri dan ahli dari industri, ditingkatkan secara signifikan (minimal 50 jam/semester/program keahlian);(c) proses pembelajaran berbasis project riil; (d) praktik kerja lapangan/industri, minimal 1 (satu) semester; (e) sertifikasi kompetensi, yang sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja (bagi lulusan dan bagi guru/instruktur); (f) pembaharuan teknologi dan pelatihan bagi guru/instruktur, secara rutin dari dunia kerja; (g) riset terapan mendukung *teaching factory*, yang bermula dari kasus atau kebutuhan; (h)

komitmen serapan, lulusan oleh industri. Selain itu, berbagai kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan dengan industri, antara lain: (1) beasiswa dan/atau ikatan dinas; (2) donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, atau bentuk lainnya.

Berdasarkan uraian di atas terkait kondisi existing Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Tangerang dapat dikemukakan; (1) penyelenggaraan sekolah dalam membangun kemitraan dengan industri bervariasi, sehingga dimungkinkan lulusan memiliki kualitas yang berbeda; (2) belum optimalnya peran industri dalam mendukung kebijakan *link and match*, dinyatakan baru sebagian kecil sekolah mampu berkolaborasi dalam penyusunan kurikulum, magang siswa dan guru, guru tamu industri ke sekolah dan kegiatan lainnya; (3) masih banyak siswa melaksanakan praktek kerja di instansi vertikal dan horizontal seperti kelurahan, kantor kecamatan dan kantor SKPD; (4) banyak kompetensi keahlian di sekolah negeri dan sekolah swasta relative sama, sehingga setiap tahun lulusan pada kompetensi tersebut sangat banyak, yang mengakibatkan lulusan kesulitan dalam mencari kerja, karena keterbatasan kesempatan kerja dari industri (5) banyak sekolah yang memiliki sarana prasarana yang minim terutama alat praktek; dan (6) sangat kekurangan guru produktif dalam penyelenggaraan pembelajaran praktik.

2.2.2 Hambatan dalam Implementasi Kebijakan *Link and match*.

Beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan *link and match* Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri di Kabupaten Tangerang antara lain; kurangnya sosialisasi kebijakan, kurangnya dukungan industri, kurangnya guru produktif dan sulitnya melakukan sinkronisasi kurikulum sekolah dengan industri.

2.2.2.1 Kurangnya Sosialisasi Kebijakan *Link and match*

1 Sosialisasi menjadi terminologi yang banyak digunakan dalam berbagai kajian khususnya dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Secara praktis, sosialisasi digunakan dalam 2 (dua) bentuk makna kata yang berbeda. Pertama, sosialisasi digunakan untuk mengungkap penyertaan kata terhadap konsep utama agar memiliki kejelasan arti atau pemahaman, seperti "sosialisasi nilai-nilai kebangsaan". Dalam konteks ini konsep utamanya yaitu nilai-nilai kebangsaan, terminologi sosialisasi digunakan untuk memperjelas konsep utama yang mana terminologi sosialisasi tidak mengubah atau membentuk konsep yang baru.

Kedua, sosialisasi digunakan untuk melengkapi kata atau menjadi bagian kata dari konsep yang sudah ada dengan tujuan membentuk konsep baru, seperti "sosialisasi politik". Dalam konteks ini konsep yang sudah ada yaitu politik yang memiliki dasar pemahaman tersendiri, pelekatan terminologi sosialisasi kedalam konsep politik akan memunculkan konsep baru yang akan memiliki pemahaman yang baru pula.

1 Pertama, pengertian sosialisasi sebagai usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara) dilihat dalam konteks kajian kebijakan publik menjadi tidak tepat, hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa kebijakan publik hakekatnya merupakan domain "publik" atau kewenangan/otoritas pemerintah, sehingga proses merubah kepemilikan menjadi milik umum bukan bagian dari proses kebijakan secara konseptual (memberi pemaknaan terhadap konsep utama), tetapi merupakan salah satu isu yang dapat digunakan sebagai substansi kebijakan. Dari pemahaman tersebut maka perubahan

kepemilikan merupakan tindakan pemerintah yang akan memiliki hasil atau *output* berupa produk kebijakan perubahan status kepemilikan yang dari awalnya merupakan milik perseorangan atau pribadi menjadi milik umum atau negara.

Kedua, pengertian sosialisasi sebagai proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya dilihat dalam konteks kajian kebijakan publik menjadi tidak tepat, hal ini dikarenakan proses seseorang untuk memahami nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan merupakan kajian dari rumpun ilmu sosiologi dan/atau ilmu antropologi. Dalam konteks kebijakan publik tidak adanya kajian proses pembelajaran dari seorang anggota masyarakat secara individu, melainkan mengkaji aktivitas kolektif masyarakat atau publik dalam interkasinya dengan permasalahan publik, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan konteks proses kebijakan publik, maka tidak akan dikaji proses pembelajaran yang tengah dilakukan seorang anggota masyarakat terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan beserta dengan lingkungannya.

Ketiga, pengertian sosialisasi sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal merupakan pengertian yang paling dapat diterima dalam konteks kajian kebijakan publik dibandingkan dengan kedua pengertian sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Kebijakan yang telah dihasilkan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut selain dapat terlaksana dengan baik juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian dilihat dari substansi kajian kebijakan publik yang mana proses masyarakat memahami suatu kebijakan hingga akhirnya mematuhi atau turut terlibat dalam melaksanakan

kebijakan tersebut merupakan domain kajian kebijakan publik. Meskipun demikian, pengertian ini juga tidak sepenuhnya tepat, dikarenakan "memasyarakatkan" kebijakan dalam konteks kajian kebijakan publik memiliki kekhususan hanya kepada kelompok masyarakat sasaran sebagaimana termuat atau diatur dalam isi atau substansi kebijakan dan tidak mencakup semua warga masyarakat secara luas.

Pemahaman mengenai terminologi sosialisasi yang memiliki perbedaan yang jauh dengan kajian kebijakan publik juga diutarakan oleh beberapa ahli seperti Damsar (2011) yang melihat sosialisasi sebagai suatu proses dengan mana seseorang menghayati norma-norma kelompok dimana ia hidup dan bertempat tinggal. Effendy (1999) yang mengemukakan sosialisasi sebagai penyediaan berbagai sumber pengetahuan yang memungkinkan orang untuk bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif dan sadar akan fungsi sosialnya, sehingga dapat aktif di dalam masyarakat.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Sutaryo (2005) yang mengemukakan pendapat bahwa sosialisasi merupakan proses aktivitas belajar dari seseorang untuk menjadi anggota masyarakat, Zanden (1979) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses interaksi sosial yang mana seorang individu mengenal cara berfikir, berperasaan dan bertingkah laku yang akan membuatnya berperan dalam suatu lingkungan masyarakat.

6
Walaupun sosialisasi bukan merupakan rangkaian dari proses kebijakan publik yang mana proses kebijakan publik sebagaimana diungkapkan oleh Jones (1984) dan Winarno (2008) terdiri dari tahap formulasi kebijakan, implementasi

kebijakan dan evaluasi kebijakan. Hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa sosialisasi tidak menjadi bagian urgensi kebijakan yang tanpa adanya sosialisasi mengakibatkan proses kebijakan tidak bisa berjalan.

Sosialisasi juga tidak memiliki keterkaitan secara langsung dan mendasar dengan ketiga tahap proses implementasi baik itu terhadap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan atau evaluasi kebijakan dikarenakan tanpa adanya keterkaitan tersebut tidak akan mengubah kedudukan setiap tahapan dalam proses kebijakan publik. Meskipun demikian, sosialisasi memiliki kedudukan yang strategis dalam terlaksananya implementasi kebijakan secara benar sebagaimana tujuan kebijakan yang telah dibuat dalam proses formulasi kebijakan. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

Pertama, isi atau substansi kebijakan perlu diketahui oleh berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran, dalam konteks ini sosialisasi berperan dalam rangka penyebarluasan isi atau substansi kebijakan kepada berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran.

Kedua, setiap pihak yang terikat dan diatur dalam suatu kebijakan yang telah dibuat memerlukan pengetahuan dan pemahaman akan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, atas dasar tersebut sosialisasi ditujukan sebagai kegiatan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak yang terkait sekaligus memberikan pedoman akan peran yang harus diberikan.

Ketiga, sebelum suatu kebijakan dilaksanakan dan masuk dalam proses implementasi kebijakan, perlu diketahui respons, kesiapan dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait, atas dasar tersebut sosialisasi akan memberikan

gambaran mengenai respons, kesiapan dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait sekaligus memberikan prediksi tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut.

Uraian tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa sosialisasi sekalipun bukan merupakan bagian dari proses kebijakan publik, tetapi perlu untuk dilakukan guna memastikan kebijakan yang telah dibuat dapat diterima dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran.

Didasarkan kepada uraian posisi sosialisasi dan nilai pentingnya dalam proses kebijakan publik sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka sosialisasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai: "upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (*target group*) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut". Dari pemahaman tersebut maka dapat dijelaskan pengertian sosialisasi dalam konteks kebijakan publik memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

Sosialisasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat dan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan dalam tahap implementasi kebijakan. Menjadi pertanyaan kemudian yaitu apakah yang harus dilakukan apabila sosialisasi yang telah dilaksanakan memiliki respons yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan?, apakah sosialisasi dapat dilaksanakan kembali?, lebih lanjut apabila waktu yang diberikan untuk sosialisasi

telah habis, apakah sosialisasi dapat dilaksanakan dalam tahap implementasi kebijakan?.

Merespons pertanyaan tersebut di atas, maka sosialisasi tetap konsisten diposisikan sebagai kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat dan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan dalam tahap implementasi kebijakan. Kegiatan untuk melakukan pendalaman isi atau substansi suatu kebijakan publik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang mana mereka tidak memiliki respons yang baik dan/atau memiliki pengetahuan dan pemahaman yang minim terhadap isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat atau terdapatnya prasyarat implementasi kebijakan yang harus dioptimalkan lagi, hal tersebut tetap dapat dilakukan dalam tahap implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan internalisasi kebijakan. Adapun perbedaannya dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

¹¹ Sosialisasi merupakan kegiatan terbatas yang hanya bisa dilakukan sebelum implementasi kebijakan dilaksanakan, meskipun demikian kegiatan penyampaian isu atau substansi kebijakan publik masih dapat dilanjutkan/diteruskan dalam proses internalisasi kebijakan, sehingga internalisasi kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sosialisasi kebijakan yang dapat dilakukan berulang-ulang apabila hasil atau *output* kegiatan sosialisasi kebijakan publik dirasakan tidak sesuai dengan harapan atau perencanaan awal.

Atas dasar tersebut maka internalisasi kebijakan dilaksanakan didasarkan kepada beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, waktu yang diberikan dalam sosialisasi kebijakan tidak lagi tersedia dikarenakan akan memasuki tahapan

implementasi kebijakan. Kedua, minimnya hasil kegiatan sosialisasi kebijakan yang mana pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan masih kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai isi atau substansi kebijakan tersebut. Ketiga, untuk memastikan kembali bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan mengetahui perannya masing-masing.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka internalisasi kebijakan merupakan kegiatan tentatif yang akan dilaksanakan apabila berbagai aspek prasyarat implementasi kebijakan belum cukup terpenuhi atau untuk memastikan kembali adanya kapasitas pengetahuan dan pemahaman yang baik dari pihak-pihak yang terlibat selagi proses implementasi kebijakan tengah dilakukan.

⁸ Kegiatan sosialisasi kebijakan memerlukan prasyarat agar dapat terlaksana dengan baik, mengingat kegiatan tersebut dapat dijadikan gambaran dan dasar bagi terlaksananya implementasi kebijakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa prasyarat tersebut antar lain adalah sebagai berikut: (1) adanya kejelasan kedudukan dan peran sosialisator. Hal ini memiliki pengertian sosialisator atau pihak yang ditunjuk melakukan sosialisasi kebijakan memiliki kewenangan secara legal-formal untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi baik itu ditunjuk oleh pejabat yang berwenang secara langsung (penguasa) atau atas perintah yang terdapat dalam isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat. Dengan begitu akan memunculkan kejelasan peran yang akan dilakukan oleh sosialisator dalam melaksanakan sosialisasi suatu kebijakan; (2) adanya kejelasan isi/substansi dan metode sosialisasi. Sosialisator dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan harus

didasarkan kepada kejelasan isi atau substansi kebijakan yang akan mencakup antar lain bagian isi atau substansi mana yang harus disosialisasikan, cara atau metode seperti apa yang akan digunakan agar sosialisasi kebijakan dapat berjalan lancar serta berapa lama waktu yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut; (3) adanya kejelasan kelompok sasaran atau *target group*. Sosialisasi kebijakan harus memiliki kejelasan kepada siapa sosialisasi dilakukan, dengan begitu sosialisator memiliki gambaran mengenai kelompok sasaran tersebut, khususnya mengenai potensi dan peluang kelompok sasaran untuk dapat mengetahui dan memahami suatu kebijakan, sehingga sosialisator dapat memetakan kapasitas kelompok sasaran agar dapat terlibat dan berkontribusi secara optimal dalam implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan; (4) adanya kejelasan hasil atau *output*. Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar perencanaan yang jelas, terarah dan terukur sehingga hasil dari sosialisasi kebijakan bisa dinilai tingkat keberhasilannya, dengan begitu sosialisasi kebijakan yang dilakukan dapat dijadikan gambaran mengenai peluang, potensi dan hambatan yang akan muncul dalam proses implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Sejalan dengan proses kebijakan publik yang terdiri dari tahap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, maka sosialisasi kebijakan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan dibuat dan sebelum implementasi kebijakan dilaksanakan. Adapun tujuan dari sosialisasi kebijakan yaitu agar kelompok sasaran atau *target group* dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kebijakan

tersebut, dengan begitu kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam proses formulasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara dan observasi, diketahui bahwa masih banyak personil kebijakan baik pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan yang belum memahami isi dari kebijakan *link and match* yang sebenarnya telah diluncurkan dalam waktu yang lama, hal ini menandakan bahwa sosialisasi dari kebijakan publik ini masih belum maksimal. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak buruk pada pencapaian tujuan kebijakan *link and match* SMK dengan industri.

Hambatan sosialisasi kebijakan ini sebetulnya telah menjadi perhatian sejak lama, namun upaya untuk melakukan sosialisasi ini juga perlu melibatkan banyak pihak, sehingga untuk memaksimalkan upaya sosialisasi ini juga menghadapi kendala yang cukup berat. Salah satunya karena koordinasi antar stakeholder yang pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengalami kesulitan, salah satunya karena masalah penganggaran. Maka salah satu akar masalah dari sosialisasi kebijakan *link and match* ini harus dicari solusi yang luas dan melibatkan seluruh unsur kebijakan *link and match* SMK dan Industri di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu hambatan yang dapat dikemukakan pada hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan *link and match* Sekolah Menengah Kejuruan dengan Industri dan Dunia Kerja di Kabupaten belum tersosialisasikan dengan baik kesemua unsur, baik dari tingkat pusat, daerah, maupun pada tataran operasional. Oleh karena itu agar kebijakan *link and match* tersebar secara distributive ke pihak pelaksana terutama pihak sekolah

dan industri, maka diharapkan pemerintah daerah secara terus menerus giat melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan tersebut.

2.2.2.2 Kurangan Guru Mata Pelajaran Produktif.

Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan *link and match* adalah kurangnya guru produktif dalam proses pembelajaran. Keberhasilan penyelenggaraan sekolah kejuruan salah satunya dapat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas guru produktif di SMK. Karakteristik guru SMK tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik SMK pada umumnya. Dalam konteks karakteristik pendidikan kejuruan secara umum, Guru produktif kejuruan memiliki karakteristik dan kompetensi professional yang spesifik, yaitu: (1) memiliki keahlian praktis yang memadai pada mata pelajaran produktif; (2) mampu melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja; dan (3) mampu merancang pembelajaran di sekolah dan di dunia usaha atau industri (Budiman, 2014).

Guru SMK harus menguasai materi dasar dan materi kompetensi kejuruan. Untuk mampu menguasainya, guru SMK harus memiliki pengalaman yang cukup, baik sebagai guru maupun sebagai orang yang terlibat langsung dalam dunia industri. Pembelajaran yang baik ditinjau dari konsep, tujuan, karakteristik dan prinsip pendidikan kejuruan adalah jika guru yang mengajar mengetahui apa yang harus diajarkan yang diintegrasikan secara langsung dengan pengalaman yang diperolehnya di dunia kerja. Dengan kata lain, pendidikan kejuruan akan efektif bila para guru dan instruktur nya memiliki pengalaman industri dan mampu mentransfer pengalamannya tersebut dengan baik kepada peserta didik.

Menurut Djojonegoro (1998), kebanyakan guru kejuruan tidak berpengalaman di industri. Karenanya secara teoritis guru hanya mengajarkan apa yang diketahuinya, apa yang tersedia di buku teks, apa dikuasainya, dan mentransfer nilai-nilai melalui perilaku kerjanya. Guru SMK, yang diperoleh melalui tamatan baru Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) kurang memiliki pengalaman kerja industri, sulit memahami wawasan mutu, wawasan pasar, wawasan keunggulan, dan wawasan nilai tambah. Lebih lanjut, dikatakan bahwa sikap guru tamatan LPTK, sangat kuat dipengaruhi oleh perilaku dan kebiasaan pengajarnya dengan ciri kebebasan akademik yang kurang pas dengan kebutuhan SMK.

Masalah yang ada di bidang kejuruan di antaranya adalah kurangnya keterampilan dari para guru untuk mengajar mata pelajaran produktif yang diampu. Artinya pengalaman guru SMK yang bersentuhan dengan dunia usaha dan industri masih minim. Karenanya pendekatan yang dilakukan guru di SMK masih banyak yang belum disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai. Kondisi tersebut terutama terjadi karena guru SMK tidak banyak yang mempunyai pengalaman langsung di dunia usaha dan industri. Pada hal pengalaman tersebut sangat penting untuk membekali para siswa yang akan langsung terjun ke dunia kerja.

Usman (2010) mengatakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab. Kompetensi guru

berarti juga kecakapan/keahlian atau kemampuan yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk proses instruksional atau belajar mengajar dan dilakukan dengan proses sadar serta penuh tanggung jawab.

Guru profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan produknya. Layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan penggunanya, serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu. Sementara Usman (2008) mengatakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan mereka membimbing peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan.

Indikator kompetensi guru profesional mencakup hal-hal sebagai berikut.

(1) Mampu melakukan suatu pekerjaan tertentu secara rasional, memiliki visi dan misi yang jelas dalam melakukan pekerjaan berdasarkan analisis kritis dan pertimbangan logis dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan tentang apa yang dikerjakannya, (2) Menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan kaidah, hipotesis dan generalisasi, serta data dan informasi) tentang seluk beluk apa yang menjadi bidang tugas pekerjaannya, dan (3) Menguasai perangkat keterampilan (strategi dan taktik, metode dan teknik, prosedur dan mekanisme, serta sarana dan instrument) tentang cara dan bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugasnya.

Salah satu indikator kunci kualitas pendidikan adalah kualitas guru, hal ini disebabkan karena guru adalah pemeran utama dalam pembelajaran sehingga

keberhasilan proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi akan berhasil dengan baik jika didukung dengan guru yang berkualitas. Mutu guru yang baik tidak lepas dari proses pembinaan guru baik pembinaan langsung oleh kepala sekolah dan pengawas maupun oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Pembinaan ini sangat penting karena guru pada umumnya masih banyak memiliki permasalahan mulai dari rendahnya kesejahteraan, rendahnya perlindungan, rendahnya mutu sampai rendahnya profesionalisme guru.

Sesuai pendapat Budiman (2014); Pengembangan profesional berkelanjutan dilakukan dengan cara: (1) praktik pengalaman industri, (2) uji kompetensi keteknikan, (3) pelatihan di tempat kerja, (4) aktif di asosiasi profesi, (5) melanjutkan pendidikan akademik, (6) pemberian tunjangan profesi pendidikan, dan (7) pembiayaan semua kegiatan peningkatan profesionalitas. Pengembangan kompetensi guru SMK memerlukan pengelolaan yang berbeda dengan guru pada umumnya, karena SMK memiliki karakteristik khusus yang khas dan berbeda dengan satuan pendidikan lainnya. Menurut Sonhadji (2013), terdapat tiga karakteristik utama pendidikan teknik (kejuruan) yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraannya, yaitu: (1) penekanan pada ranah psikomotorik, (2) sesuai dengan perkembangan teknologi, dan (3) orientasi pada bidang pekerjaan.

Pengembangan profesionalitas merupakan peluang bagi guru untuk mempelajari hal yang dibutuhkan untuk mengetahui dan apa yang dapat dilakukan untuk membantu siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Pendapat ini menunjukkan bahwa guru SMK dituntut untuk melakukan pengembangan diri agar

mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, pengembangan keprofesionalan guru merupakan salah satu bagian dari pengembangan yang tidak dapat dipisahkan dari peran sekolah. Brown (2000) menyatakan bahwa pengembangan keprofesionalan merupakan proses kegiatan belajar yang diikuti guru pendidikan kejuruan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Peningkatan kompetensi guru SMK yang demikian sesuai dengan pendapat Murniati dan Usman (2009), yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memberikan bekal berbagai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada peserta didik sehingga mampu melakukan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang berkualitas harus mampu menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi, baik perubahan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun struktur ketenagakerjaan. Guru SMK sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi perubahan tersebut.

Guru SMK yang profesional wajib untuk selalu mengembangkan pengetahuan dan keahliannya. Guru tersebut juga harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan dan dituntut cepat menyesuaikan diri melalui kegiatan-kegiatan pengembangan diri, seperti workshop, magang, dan seminar. Guru profesional akan berkomitmen secara pribadi dan bersama-sama berusaha mengembangkan diri dan profesinya. Kompetensi profesional guru dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah magang di industri. Salah satu bentuk dari pendidikan dan pelatihan guru adalah program magang industri.

Program magang industri adalah pelatihan yang dilaksanakan di industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Program magang industri bagi guru SMK dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa untuk mampu mengajarkan keterampilan khusus tertentu beserta budaya kerjanya kepada para peserta didik maka guru harus mengalaminya secara nyata terlebih dahulu di industri. Mengajar merupakan sebuah pekerjaan yang kompleks dan memerlukan profesionalitas maka upaya pengembangan profesionalisme guru merupakan hal yang penting untuk meningkatkan mutu dalam praktik pembelajaran. Melalui program magang secara teratur, diharapkan guru dapat mengembangkan profesionalitas pembelajarannya.

Konsep magang industri bagi guru SMK dapat diacukan pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program magang di industri dapat memberikan pengetahuan kepada guru tentang kompetensi mana yang harus dipertajam dalam membangun Profesionalisme Guru Produktif Melalui Magang Industri (Nur Siti Pangwartani) pembelajaran agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuniarti (2014: 842), menyatakan bahwa para guru kejuruan yang melaksanakan magang industri harus dilibatkan secara langsung dalam kegiatan bekerja di industri/perusahaan sehingga mereka memperoleh pengalaman nyata di dunia kerja.

Program magang³ adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini diperuntukkan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Program magang di pilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman nyata. Sebagai salah satu bentuk diklat guru produktif SMK, magang industri memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai.² Tujuan magang industri antara lain untuk: (1) meningkatkan technical skill dan managerial skill para guru sehingga produktivitas mereka meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitasnya; (2) meningkatkan moral para guru melalui peningkatan kualitas dan kesesuaian keahliannya dengan pekerjaan yang harus dilaksanakannya sehingga antusias untuk menjalankan tugasnya juga menjadi lebih baik; dan (3) meningkatkan kesempatan guru dalam berkarir di bidang pendidikan.

Guru produktif sangat diperlukan dalam mengajarkan materi ajar produktif yang menjadi kekhasan sekolah kejuruan, yang keberadaannya disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan, diketahui bahwa hampir di semua sekolah kejuruan di Kabupaten Tangerang mengalami kekurangan guru produktif, bahkan sekolah-sekolah tertentu hampir tidak memiliki guru produktif. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri, dalam memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas tidak tercapai.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas dapat dikemukakan berbagai hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan *link and match*

antara sekolah kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri di Kabupaten Tangerang yaitu belum tersosialisasikannya kebijakan *link and match* sebagai kebijaklan Pemerintah Pusat dengan baik, kurangnya guru produktif jumlah dan mutunya dalam penyelenggaraan pembelajaran praktek kejuruan di sekolah, serta sinkronisasi kurikulum SMK dengan Industri yang masih rendah.

2.2.2.3 Sinkronisasi Kurikulum Belum Terlaksana untuk Setiap Sekolah.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu sistem pendidikan dalam pendidikan nasional (pendidikan menengah) yang mempersiapkan peserta didik terutama bekerja dalam bidang tertentu (penjelasan pasal 15 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas). Hal ini dilakukan dengan tujuan mengerahkan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja nasional (man power atau person power).⁴ Sekolah Menengah Kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik dan mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta pengembangan sikap profesional.

Transformasi pendidikan kejuruan merupakan miniatur dunia usaha atau dunia industri (DU/DI), sehingga pencapaian keterampilan, kebiasaan berfikir dan etos kerja dapat terbentuk sesuai dengan tuntutan DU/DI sehingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi para peserta didik di SMK memerlukan latihan keterampilan dimana situasi belajar harus merupakan simulasi pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan yang sebenarnya yang diatur dalam kurikulum.

Kurikulum SMK bersifat sederhana, luwes, dinamis dan relevan. Kurikulum kejuruan berdasarkan pada identifikasi kebutuhan pekerjaan (Finch, 1979:10) karena dengan identifikasi tersebut hal yang diajarkan di sekolah akan sama dengan yang ada di lapangan pekerjaan. Dengan demikian kurikulum SMK harus dikembangkan sehingga mengurangi kesenjangan antara sekolah dengan DUDI. Atas masukan dari DU/DI, pihak sekolah akan segera mengadaptasikan kebutuhan yang ada sehingga diharapkan menghasilkan lulusan yang bisa beradaptasi di lingkungan DU/DI dimana mereka akan bekerja.

⁴ Kurikulum dapat menjembatani kesenjangan antara dunia usaha dengan kondisi sekolah, dalam hal ini tentunya pihak sekolah harus berusaha menyamakan persepsi dengan kebutuhan dunia usaha dan kondisi pasar, mengingat lulusan sekolah menengah kejuruan sebagian besar diserap oleh DU/DI dan sebagian lagi berwirausaha di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu DU/DI adalah mitra kerja SMK, terutama saat peserta didik melaksanakan prakerin (praktik kerja industri), bagi SMK pelaksanaan prakerin adalah praktik kerja yang sesungguhnya, saat praktik kerja industri diharapkan peserta didik dapat mengembangkan dan menerapkan apa yang diperolehnya selama belajar di sekolah. Selain itu saat prakerin peserta didik akan banyak belajar tentang masalah-masalah yang timbul saat bekerja, dengan begitu setelah menyelesaikan program prakerin, peserta didik memiliki keterampilan dan wawasan yang lebih baik.

Namun dalam kenyataan pihak DU/DI terkadang masih menilai peserta didik yang prakerin belum memiliki cukup persiapan baik dalam teori maupun praktik. Salah satu yang menimbulkan kesenjangan adalah masih tertinggalnya

teknologi yang diajarkan di sekolah, sedangkan saat ini teknologi yang ada di DU/DI semakin canggih, dengan kata lain sekolah masih selalu ketinggalan teknologi. Melihat kondisi yang demikian perlu secepatnya melakukan penyesuaian kurikulum karena pada kenyataannya sekolah menengah kejuruan sebagai penyedia tenaga terampil, belum bisa memenuhi standar dunia usaha karena adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja (Irvan Jaya Musrida: 2010), meskipun sinkronisasi kurikulum pernah dilakukan namun intensitasnya perlu dilihat secara mendalam, tidakkah hal tersebut dilakukan hanya sekedar menjalankan program pemerintah ataukah sinkronisasi kurikulum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk itulah betapa pentingnya pelaksanaan sinkronisasi kurikulum dan melihat sejauh mana keefektifan program-program kurikulum sekolah untuk mencapai tujuan kurikulum yang nantinya dapat menjadi masukan bagi sekolah untuk lebih memiliki "kemampuan dalam menyusun program- program penyesuaian diri yang akan ditempuh dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu lima tahun" (Buchori dalam Syafaruddin, 2008:2).

Oleh karena itu, untuk menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik idealnya kurikulum SMK disusun secara bersama antara sekolah dengan pihak industri, agar capaian kompetensi siswa sesuai dengan harapan industri. Hasil penelitian melalui observasi ke sekolah sekolah di Kabupaten Tangerang, ditemukan bahwa baru Sebagian kecil SMK Negeri dan SMK Swasta yang mampu melaksanakan kegiatan sinkronisasi kurikulum.

2.2.3 Strategi untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang

Pada bagian ini dipaparkan pembahasan hasil penelitian, melalui wawancara terhadap responden, dengan mengacu kepada teori Goggin *et al*, dan analisis data dengan menggunakan analisis SWOT yang dipaparkan sebagai berikut:

2.2.3.1 Analisis Strategi Berdasarkan Teori Goggin *et al* (1990)

Tujuan ke tiga dari penelitian ini adalah untuk menemukan strategi implementasi Kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang. Analisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Goggin *et al* (1990) yang meliputi unsur isi pesan, bentuk pesan dan persepsi terhadap pimpinan. Data-data tentang hal tersebut akan dibahas dan disajikan berikut:

2.2.3.1.1 Isi Pesan

Aspek pertama dalam mengukur keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah mengetahui isi pesan yang memperkuat suatu kebijakan. Isi pesan dalam penelitian ini digali peneliti melalui tiga indikator, yakni kejelasan isi kebijakan, kredibilitas pesan sebagai suatu solusi, dan konsistensi kebijakan.

Isi pesan kebijakan yang dikemukakan oleh Goggin terdiri dari 3 (tiga) indikator, yakni kejelasan pesan, kredibilitas pesan dan konsistensi pesan.

2.2.3.1.1.1 Kejelasan Kebijakan

Kejelasan pesan kebijakan di sini dimaknai sebagai proses pemahaman informasi kebijakan oleh pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Mengingat pentingnya kejelasan kebijakan, maka diajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman substansi kebijakan *link and match* SMK dengan Industri yang dilaksanakan oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten kepada pelaksana kebijakan yaitu satuan pendidikan SMK (*policy implementators*).

Kebijakan perlu disampaikan dengan jelas agar pelaku atau penerima kebijakan dapat mengetahui apa yang menjadi tujuan, dan arah kebijakan. Disamping itu juga agar para pelaku atau pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan pelaksanaan kebijakan dengan benar sehingga tujuan utama dibuatnya kebijakan *link and match* SMK dengan industri dapat dicapai sesuai dengan visi dan misi pembangunan bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Untuk mengetahui bagaimana kejelasan pesan kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan, penulis mewawancarai informan dengan pertanyaan:

“apakah kebijakan *Link and match* SMK dan IDUKA yang ada dianggap jelas secara isi pesan yang ingin tersampaikan?”

Pertanyaan ini dijawab secara beragam oleh informan, adapun jawaban dari beberapa informan dari unsur Kepala Sekolah SMK, sebagai berikut:

“kebijakan, dalam hal ini ada kemitraan SMK dengan DU/DI yang ditandai adanya MoU, telah mencantumkan secara jelas program-program simbiosis mutualisme antara satuan pendidikan dan IDUKA, dapat berupa prakerin, pemagangan, CSR, guru tamu, seminar, dan program lainnya yang mampu meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan.” (wawancara pada tanggal 8 Desember 2022).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lain dari Industri, sesuai petikan wawancara peneliti sebagai berikut:

“Secara konten / isi kebijakan *link and match* industri dengan SMK sudah baik tetapi masih banyak industri yg belum memahami konsep atau kebijakan tersebut.” (Wawancara pada tanggal 10 Maret 2022)

Berdasarkan beberapa pernyataan informan di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan *link and match* telah ada dan dilaksanakan oleh SMK, namun demikian isi dari kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan.

Implementasi kebijakan *link and match* di Kabupaten Tangerang dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik bilamana ada kejelasan pesan atau informasi kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dengan kata lain bahwa efektifitas sebuah kebijakan sangat ditentukan dari bagaimana pesan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana dilapangan. Sehingga pelaksana kebijakan memahami isi, substansi dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.

2.2.3.1.1.2 Kredibilitas Pesan sebagai sebuah Solusi

Kredibilitas pesan kebijakan yang akan disampaikan kepada pelaksana kebijakan sangat penting dan menjadi perhatian. Karena kredibilitas pesan kebijakan mengandung nilai-nilai, prosedur, maupun pemahaman. Kredibilitas pesan kebijakan ikut menentukan efektifitas implemementasi kebijakan. sehingga kredibilitas pesan kebijakan merujuk pada suatu informasi yang memiliki tujuan dan sasaran yang baik dan kelayakan untuk dipercaya.

Kredibilitas pesan kebijakan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan *efektivitas* informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pemilihan komunikator yang efektif untuk menyampaikan pesan kebijakan juga akan menentukan dipahami atau tidak dipahaminya sebuah kebijakan. Oleh karena itu kredibilitas pesan kebijakan banyak ditentukan oleh kredibilitas penyampai pesan. Kredibilitas komunikator sangat ditentukan oleh 1). Kemampuan dan keterampilan menyajikan pesan seperti memilih tema, metode dan media yang sesuai dengan situasi, 2) Memiliki budi pekerti dan kepribadian baik serta disegani oleh khalayak, 3). Memiliki keakraban dan hubungan baik dengan setiap orang.

Untuk mengetahui kredibilitas pesan kebijakan *link and match* SMK dengan industri, berikut petikan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dari unsur industri dan SMK.

“Kebijakan yang dibuat tanpa adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan maka tidak akan bisa terimplementasi dengan maksimal, sehingga tetap jumlah pengangguran akan terus bertambah”. (Wawancara, tanggal 8 Desember 2023).

Senada dengan pendapat diatas, informan yang berasal dari unsur SMK memberikan pandangan yang sama terkait dengan tingkat kredibilitas kebijakan *link and match* SMK dengan industri di Kabupaten Tangerang.

“Bisa menjadi solusi asalkan dilaksanakan secara konsisten/berkelanjutan bukan hanya sekedar bukti administrasi. Kebijakan *link and match* bisa menjadi solusi jika dilaksanakan secara konsisten/berkelanjutan bukan sekedar kelengkapan administrasi.” (Wawancara tanggal 8 Desember 2023).

Begitupula pandangan yang dikemukakan oleh Kepala SMK Negeri di Kabupaten Tangerang yang menyampaikan pandangannya bahwa kredibilitas

kebijakan itu sangat bergantung dengan bentuk dan *action* dari program yang diselenggarakan oleh pelaksana kebijakan ini. Manakala program ini dapat menyentuh kebutuhan dari industri dan lingkungan, maka kebijakan yang dibuat pun dianggap kredibel.

“Kebijakan *Link and match* yg menjadi solusi pengangguran adalah magang siswa dan perekrutan dari industri. Rancangan *link and match* harus sesuai dengan kebutuhan industri lingkungan dan melibatkan langsung siswa SMK” (Wawancara tanggal 8 Desember 2023).

Sementara itu Kepala SMK swasta mengungkapkan bahwa tingkat kredibilitas pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sudah dianggap tinggi, namun perlu dibenahi dan disempurnakan lagi. Mengingat setiap satuan pendidikan mempunyai keinginan untuk membangun sekolahnya lebih baik lagi.

“Tingkat kredibilitas...tinggilah...tingkat kredibilitas pesan kebijakan menyangkut upaya *link and match* perlu ada sisi-sisi yang perlu dibenahi menyangkut bagaimana kredibilitas semua unsur baik itu unsur SMK, Kantor Cabang Dinas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Kabupaten Tangerang maupun Industri.” (Wawancara tanggal 8 Desember 2023).

Sementara itu pandangan Kepala SMK Negeri lainnya di Kabupaten Tangerang mengungkapkan bahwa kebijakan *link and match* belum memiliki tingkat kredibilitas yang cukup baik namun sebagai bawahan sudah barang tentu akan loyal terhadap kebijakan atasan.

2.2.3.1.1.3 Konsistensi Kebijakan

Kebijakan *Link and match* merupakan suatu tindakan dari pemerintah berupaya meminimalisir ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaan. Kecocokan antara pendidikan dan pekerjaan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi seseorang dapat diterima dalam pekerjaan. Sedangkan jika pendidikan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja maka menjadi salah satu penyebab pengangguran (Sinaulan, 2019).

Konsistensi dapat diartikan sebagai kemantapan dalam bertindak. Konsistensi dalam kebijakan sangat penting karena akan menciptakan persepsi positif dan kepercayaan (*trust*) bagi pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku. Kebijakan yang tidak konsisten akan menciptakan persepsi negatif bagi pelaksana dan penerima kebijakan.

Konsistensi kebijakan akan menimbulkan kepercayaan publik. Bukanlah hal yang mudah untuk membangun kepercayaan publik, namun bukan hal yang mustahil juga untuk dilakukan. Kebijakan publik yang konsisten merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan publik. Sehubungan hal tersebut, penting bagi pengambil kebijakan untuk senantiasa mewujudkan dan membangun kepercayaan publik salah satunya dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penting ketika kebijakan akan dirumuskan. Prinsip tersebut penting dilakukan sejak masih tahap perumusan sampai pada proses implementasi. Konsistensi kebijakan harus tetap dijaga agar *efektivitas* kebijakan publik dapat terwujud.

Berikut petikan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan terkait dengan konsistensi kebijakan *link and match* SMK dengan dunia industri di Kabupaten Tangerang.

“Kebijakannya sudah konsisten tinggal penerapannya saja yg belum maksimal antara pihak sekolah dengan industri”

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh informan dari unsur Sekolah

Memengah Kejuruan di Kabupaten Tagerang, sebagai berikut:

“Selama ini sudah konsisten, jika ada yang tidak karena ada *force majeure*. Kebijakan *link and match* ini sudah lama diterapkan di SMK, namun memang tidak berarti lepas dari kendalanya, banyak kendalanya, salah satunya karena terkadang upaya upaya ini hanya menjadi rutinitas tanpa mengandung nilai dan keseriusan”

“Masih banyak SMK yang belum konsisten” (wawancara tanggal 8 Desember 2023)

Pernyataan di atas menunjukkan kebijakan *link and match* ini belum maksimal dilaksanakan, kurang konsisten yang diakibatkan regulasi yang kurang kontinyu dan menyeluruh dalam pelaksanaannya. Pesan kebijakan harus bersifat utuh, tepat dan akurat agar tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi pembangunan bidang pendidikan. Ketidakkonsistenan penyampaian pesan kebijakan akan menyebabkan terjadinya distorsi pemahaman yang berdampak pada gagalnya kebijakan. Penafsiran yang salah baik dari satuan pendidikan maupun masyarakat, akan menyebabkan lemahnya partisipasi birokrasi dan masyarakat

2.2.3.1.2 Bentuk Pesan

Aspek kedua dalam mengukur efektifitas implementasi sebuah kebijakan adalah mengetahui bentuk pesan yang memperkuat suatu kebijakan. Bentuk pesan dalam penelitian ini digali peneliti melalui lima indikator, yakni efisiensi kebijakan,

partisipasi masyarakat, frekuensi pengulangan pesan, tipe kebijakan dan penerima kebijakan.

2.2.3.1.2.1 Efisiensi Kebijakan

Efisiensi dapat dimaknai sebagai ukuran keberhasilan kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Semakin sedikit sumber daya dan sumber dana yang digunakan untuk mencapai tujuan, maka implementasi kebijakan yang sedang dilakukan dapat dikatakan semakin efisien. Implementasi kebijakan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau menjadi efektif dalam pemanfaatan dana.

Efisiensi yang dilakukan pada umumnya dalam upaya; 1). Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan 2). Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan 3). Untuk memaksimalkan penggunaan segala sumberdaya yang dimiliki sehingga tidak ada sumberdaya atau sumberdana yang terbuang percuma, dan 4) Untuk memaksimalkan mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan dari kebijakan yang dibuat.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis, berikut petikan wawancara dari informan yang berhasil dirangkum oleh peneliti.

“Tidak semua dirumuskan secara efektif dan efisien. Tergantung dengan industri pasangannya. Industri yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan pasti akan merumuskan dengan baik dengan sekolah” (wawancara pada tanggal 8 Desember 2023)

Demikian halnya dinyatakan juga oleh informan dari salah satu SMK swasta di Kabupaten Tangerang yang dikutip sebagai berikut:

“Kurang Efisien karena masih banyak keterbatasan di lapangan. Walaupun sudah tercantum pada RENJA dan ARKAS, sekarang ini belum mencapai perumusan tersebut tetapi alangkah baiknya harus dirumuskan sampai kesana” (wawancara pada tanggal 8 Desember 2023)

Kebijakan pembiayaan *link and match* di Kabupaten Tangerang sudah menjadi komitmen Pemerintah Banten sebagai upaya melaksanakan visi dan misi pimpinan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Penerapan kebijakan *link and match* SMK dengan industri di Provinsi Banten, umumnya, Kabupaten Tangerang khususnya bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja di lingkungan. Hal ini sejalan sebagai usaha untuk mencari titik temu antara dunia pendidikan sebagai produsen dan DUDI sebagai konsumen. Menurut Sanjaya (2009), tujuan gerakan *link and match* adalah untuk mendekatkan pemasok (*supplier*) dengan mutu sumber daya manusia, terutama yang berhubungan dengan kualitas ketenagakerjaan. Upaya mendekatkan lulusan SMK dengan industri ini juga merupakan salah satu upaya efisiensi dalam ketenagakerjaan.

2.2.3.1.2.2 Partisipasi Masyarakat

Hal lain yang harus menjadi perhatian dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mempengaruhi dan mendorong keberhasilan suatu kebijakan publik.

Kebijakan pendidikan dibuat dan diimplementasikan untuk memecahkan berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu adanya dukungan serta partisipasi dari masyarakat sendiri. Oleh karenanya sikap kepedulian yang tinggi harus dimiliki oleh masyarakat sekitar agar tujuan pembuatan kebijakan benar-benar tercapai.

Partisipasi masyarakat mengandung arti keikutsertaan dalam mendukung kebijakan. Beberapa unsur penting yang tercakup dalam konsep partisipasi di antaranya: (1) partisipasi bukan hanya keikutsertaan secara fisik tetapi juga pikiran dan perasaan; (2) partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi orang lain sehingga daya kemampuan berpikir serta inisiatifnya dapat diarahkan kepada tujuan kebijakan.

Dalam kebijakan *link and match* SMK dengan industri di Kabupaten Tangerang dukungan masyarakat menjadi latar dalam pelaksanaan aktifitas kemitraan dan mempengaruhi kebijakan *link and match* yang dijalankan oleh SMK dengan dunia industri di Kabupaten Tangerang

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan *link and match* SMK dengan Industri di Kabupaten Tangerang yang digulirkan oleh Pemerintah dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yang dianggap memahami implementasi kebijakan tersebut, dengan pertanyaan, apakah masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan *Link and match* SMK dan IDUKA?

“Ya... masyarakat dalam hal ini Orang tua dilibatkan untuk rapat. kebijakan yang berkaitan dengan mutu kompetensi siswa, komite menjadi mitra sekolah dan pihak IDUKA dilibatkan pada penyelaras kurikulum” (wawancara pada tanggal 8 Desember 2023)

Pada kebijakan *link and match* SMK, orang tua memiliki peran yang cukup signifikan, karena itu menurut informan,sekoah melibatkan orang tua dalam hal ini adalah komite sekolah dalam program penyelarasan kurikulum.

Pernyataan lain dikemukakan oleh salah satu kepala sekolah SMK Negeri di Kabupaten Tangerang.

Karena dampak pendidikan gratis pada SMK negeri khususnya yang dicanangkan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat ini sangat sulit diwujudkan, karena banyak orang tua siswa yang seakan lepas tangan dari tanggung jawab pendidikan, salah satunya dalam upaya program *link and match*”

Walaupun dana yang diberikan oleh pemerintah Pusat melalui dana BOS cenderung tidak mencukupi untuk memenuhi biaya operasional sekolah terutama bagi sekolah kejuruan yang memiliki tanggungjawab menyiapkan peserta didik untuk terampil sesuai dengan bidangnya agar dapat diterima oleh Industri dengan memperbanyak pembelajaran berbasis praktik sesuai dengan kompetensi keahliannya. Disamping itupula pada sekolah kejuruan peserta didik harus melakukan praktek kerja industri (PKL) untuk mensinkronkan teori dan praktik yang mereka lakukan disekolah dengan budaya kerja di industri.

2.2.3.1.2.3 Frekwensi Pengulangan Pesan

Salah satu kendala implementasi kebijakan adalah bagaimana pembuat kebijakan dapat penyampaian pesan kebijakan agar dapat dipahami oleh pelaksana dan penerima kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini sangat penting untuk menghindari terjadinya salah persepsi dalam memahami dan melaksanakan kebijakan. Untuk menghindari salah persepsi memahami kebijakan, perlu adanya pengulangan pesan kebijakan. Semakin sering pengulangan pesan kebijakan

dilakukan, semakin jelas kebijakan bisa dipahami baik oleh pelaksana maupun penerima. Oleh karena itu, manakala kebijakan sudah dibuat dan diyakini dapat menyelesaikan permasalahan, aparatur pemerintahan seharusnya memiliki pandangan dan sikap yang sama.

Tentu saja tidak ada kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan secara sempurna, selalu akan ada kelemahan dalam implementasinya. Namun, upaya untuk meminimalisir kekeliruan harus dapat diantisipasi sejak dini. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah pengulangan pesan kebijakan secara utuh kepada pelaksana dan penerima kebijakan.

Kebijakan harus dipahami secara jelas, argumentatif dan dirasakan niat baik untuk membangun pemahaman bersama. Disamping itu pula agar terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan pelaksana dan penerima kebijakan untuk menghindari potensi konflik. Untuk mengetahui frekuensi pengulangan pesan kebijakan *link and match* SMK dengan industri, peneliti melakukan wawancara terhadap informan pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan *Link and match* SMK dan IDUKA di Kab. Tangerang masih sangat jarang disosialisasikan dan direvisi efektifitasnya. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa pengulangan atau sosialisasi kebijakan *link and match* SMK dengan industri ini sangat jarang, bahkan informasi yang di dapat dari informan pun berbeda-beda.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan *link and match* SMK dengan industri ini antara lain dengan kegiatan kerjasama antara SMK dengan industri yang difasilitasi oleh ⁵ Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Provinsi Banten, maupun dengan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang.

Informan berpandangan bahwa informasi kebijakan memang dilakukan dan berulang-ulang dari pembuat kebijakan, namun substansi kebijakan pada dasarnya sama yaitu sekolah harus melakukan inovasi untuk dapat meningkatkan *link and match* kurikulum dengan industri, salah satunya dengan MoU.

2.2.3.1.2.4 Tipe Kebijakan

Secara kongkrit, bentuk kebijakan publik dibedakan atas 4 tipe, yaitu tipe kebijakan regulatif, tipe kebijakan redistributif, tipe kebijakan distributif, dan tipe kebijakan konstituen. Kebijakan regulatif adalah kebijakan yang bersifat mengatur, kebijakan ini mengandung paksaan dan harus diterapkan secara langsung kepada warga masyarakat. Kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari warga masyarakat kemudian didistribusikan kembali. Kebijakan distributif merupakan kebijakan yang memberikan kepada masyarakat. Kebijakan ini pada umumnya berupa penggunaan belanja daerah yang digunakan secara langsung oleh individu. Kebijakan konstituen merupakan kebijakan yang bukan ketiga kebijakan sebelumnya. Kebijakan ini berhubungan dengan masalah keamanan, masalah luar negeri dan pelayanan administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *link and match* SMK dengan industri di Kabupaten Tangerang merupakan tipe kebijakan distributif karena kebijakan ini memang pendanaannya berasal dari pajak yang diperoleh dari masyarakat wajib pajak dan penggunaannya kembali diperuntukan

bagi masyarakat khususnya dibidang pendidikan dn merupakan tipe kebijakan yang berasal dari pusat.

“Kebijakan pusat adalah kebijakan dari atas ke bawah berupa aturan/ dasar hukum kebijakan yang akan menjadi kebijakan turunan yang dilaksanakan secara lokal/oleh sekolah tertentu” (wawancara pada tanggal 8 Desember 2023)

2.2.3.1.2.5 Penerima Kebijakan

Suatu kebijakan dibuat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan *link and match* SMK dengan industri digulirkan dalam upaya mendekatkan lulusann SMK dengan Industri sehingga dapat diserap maksimal, sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan utama dari program ini adalah memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan bagi masyarakat Banten. Ada dua pihak yang menerima kebijakan ini yakni, masyarakat dan industri.

“Untuk memaksimalkan tujuan kebijakan *Link and match*, SMK dan industri harus serius bersinergi mengenai ikatan kerjasama di bidang apa saja apakah penerimaan PKL atau sampai penyerapan tenaga kerja” (wawancara pada tanggal 9 Desember 2023)

Pernyataan tersebut sejalan dengan informan dari unsur SMK sebagai berikut:

SMK dan IDUKA harus bersikap terbuka dengan perubahan yang ada. Satuan Pendidikan harus mampu menciptakan lulusan yang siap kerja, dan IDUKA membuka seluas-luasnya informasi pelatihan, pemagangan dan kesempatan kerja yang ada.. Hal tersebut bertujuan agar alumni dipastikan siap kerja sesuai permintaan/persyaratan IDUKA dan mampu bersaing dengan masyarakat lainnya di Kabupaten Tangerang. (wawancara pada tanggal 8 Desember 2023)

Hasil penelitian menunjukkan, baik industri maupun masyarakat merespon kebijakan *link and match* SMK dengan Industri ini dengan sangat baik, karena memang dua pihak ini merupakan pihak yang saling membutuhkan.

2.2.3.1.3 Persepsi Terhadap Pimpinan

Menurut Goggin et al (1990: 20-21, 31-40), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: 1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, 2) kapasitas pusat/negara, dan 3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Untuk mengetahui persepsi terhadap pimpinan pada kebijakan *link and match* SMK dengan dunia industri, peneliti menggunakan indikator sumber daya, legitimasi pimpinan daerah dan kredibilitas pimpinan.

2.2.3.1.3.1 Sumber Daya

Setiap kebijakan tentu membutuhkan sumber daya untuk dapat terlaksana dengan maksimal. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Van Mater dan Van Horn (1974).

Sumber daya dalam kebijakan *link and match* SMK dan Industri terdiri dari ketersediaan sumber daya pengajar di sekolah, ketersediaan pengajar di industri, keahlian / kompetensi pengajar di sekolah, keahlian / kompetensi pengajar di

industri, ketersediaan sarana pelatihan, dukungan anggaran dan dukungan teknologi.

A. Sumber daya pengajar di sekolah

Tenaga pendidik di sekolah kejuruan merupakan komponen sekolah yang berhubungan langsung dengan siswa terutama melalui proses belajar mengajar (PBM), sehingga dapat dikatakan Guru atau tenaga pendidik sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, terutama pada sekolah kejuruan.

Ketersediaan tenaga pendidik menjadi *crusial*, karena kualitas pendidikan kejuruan ditentukan oleh kualitas pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik. Kondisi eksisting pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Tangerang, jumlah Guru kejuruan pada SMK masih belum sesuai dengan jumlah ideal.

Hasil observasi penelitian menunjukkan rasio guru terhadap murid Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Tangerang adalah sebesar 18,83:1, yang artinya satu orang guru mempunyai beban untuk mengajar 18 sampai 19 peserta didik. Angka rasio ini masih di atas rasio ideal yang di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, terkait rasio Guru dan Murid Ideal bagi jenjang Pendidikan SMA/SMK atau sederajat yaitu 15:1, yang artinya satu orang guru mengajar 15 peserta didik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Tangerang masih kekurangan tenaga pengajar/guru.

Hal berbeda disampaikan oleh pimpinan industri yang ditemui oleh peneliti, yang di kutip sebagai berikut:

“Untuk sumber daya manusia dan biaya seharusnya tidak dijadikan alasan terhambatnya *link and match* karena kita memiliki potensi yg luar biasa. Jumlah pendidik SMK yang sesuai dengan kebutuhan industri mungkin menjadi salah satu yang krusial dibutuhkan” (wawancara pada tanggal 8 Desember 2023)

Pernyataan berbeda dikemukakan oleh unsur SMK, sebagai berikut:

SDM masih perlu refresh dan biaya memerlukan dukungan masyarakat terutama nonbudgeter, tidak hanya bisa mengandalkan BOSNAS, SDM yang ada harus selalu di refresh dan Sumber dana tidak hanya 1 sumber. (wawancara pada tanggal 8 Desember 2023)

Hal lain yang menjadi perhatian peneliti terkait kompetensi personal yang belum memadai. Menyadari keterbatasan sumberdaya, kepala sekolah biasanya memilih tim yang dapat dipercaya walaupun tidak memiliki kompetensi sesuai dengan latarbelakang keilmuannya dan kebutuhan industri.

Dari hasil wawancara tampak jelas bahwa pada dasarnya satuan pendidikan memiliki sumberdaya manusia bila hanya mengelola administrasi sederhana seperti administrasi pembiayaan program *link and match* SMK dengan Industri. Namun, satuan pendidikan mengalami kesulitan bilamana mengelola kebijakan pembiayaan pelaksanaan program *link and match* SMK dengan Industri. Seperti diketahui satuan pendidikan tidak memiliki sumberdaya sebagaimana pengelolaan keuangan sebagaimana Perpres Nomor 16 tahun 2018. Menyadari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh satuan pendidikan, dalam hal melakukan kerjasama dengan industri, pihak sekolah harus memiliki inovasi untuk menjalin kerjasama efektif dengan industri.

Dalam hal sumberdaya keuangan, bila mencermati komitmen pimpinan daerah, Pemerintah Provinsi Banten dapat menyediakan anggaran yang cukup untuk mensukseskan visi dan misi bidang pendidikan melalui kebijakan

pembiayaan pendidikan gratis juga melalui Disnakertrans. Dukungan anggaran yang memadai merupakan salah satu aspek penting dalam melaksanakan kebijakan. Komitmen ketersediaan anggaran yang cukup merupakan indikator keseriusan dalam pembuatan kebijakan. Perencanaan anggaran didasarkan pada data jumlah murid/siswa pada setiap jenjang satuan pendidikan dapat dikatakan bahwa penganggaran yang tepat didukung oleh kemampuan dan komitmen penyelenggara pendidikan di sekolah merupakan sumberdaya dalam mewujudkan terlaksananya kebijakan pembiayaan *link and match* di Provinsi Banten umumnya dan Kabupaten Tangerang pada khususnya.

2.2.3.1.3.2 Legitimasi Pimpinan Daerah Pembuat Kebijakan

Legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan dari masyarakat. Legitimasi dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, kebijakan yang diambil oleh seorang pimpinan. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya sesungguhnya lebih ditentukan oleh keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak manakala seorang pemimpin membuat suatu kebijakan. Legitimasi pemimpin sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dan diperlukan karena dapat menimbulkan dukungan dari masyarakat.

Ada 5 macam legitimasi yang harus dimiliki seorang pimpinan pemerintahan, yaitu; 1). Legitimasi politis, 2). Legitimasi konstitusional, 3). Legitimasi moral, 4). Legitimasi kultural dan 5). Legitimasi religius. Dari kelima macam legitimasi tersebut, legitimasi moral berperan penting dalam mengelola pemerintahan. Dengan legitimasi moral, seorang pimpinan harus bersikap jujur dan

tulus dalam menjalankan pemerintahan. Legitimasi moral sangat berperan penting karena akan bisa menimbulkan dukungan konkret dari masyarakat. Suatu Pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat bukan hanya karena memiliki legitimasi secara politis tetapi juga karena pemimpin memiliki legitimasi moral yang baik.

Untuk mengetahui legitimasi pemimpin dalam membuat kebijakan pembiayaan kebijakan *link and match*, peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang dianggap memiliki kapabilitas untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan implementasi kebijakan ini.

Sangat support, hanya saja tidak semua Iduka siap utk berkolaborasi dgn SMK dgn 8+i nya. Pemerintah memegang peranan sebagai controller, yaitu pada pengesahan berkas administrasi dan monitoring. (wawancara pada tanggal 9 Desember 2023)

Dukungan pemerintah juga dikemukakan oleh informan dri unsur industri, di kutip sebagai berikut:

Kepala daerah sudah sangat mendukung sekali kebijakan tersebut dan bahkan membuatkan program program yang berkaitan dengan pencarian kerja. Pimpinan Daerah menjadi penentu kebijakan yang berlaku, controller dan pelaksana monitoring pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya bermanfaat untuk penyusunan RTL (wawancara pada tanggal 8 Desember 2023)

Namun pendapat lain dikemukakan oleh informan dari unsur industri lainnya:

“belum memenuhi kebutuhan secara menyeluruh disekolah, kebijakan yang diikeluarkan oleh pemerintah Sudah meligitimate namun masih kurang dalam pelaksanaannya” (wawancara pada tanggal 8 Desember 2023)

Hasil penelitian mengungkapkan Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki legitimasi yang baik. Hal ini dikarenakan pimpinan daerah ³ memiliki pengalaman

yang cukup baik sebagai birokrat maupun sebagai kepala daerah sebelumnya di Pemerintahan Kota. Begitupula pandangan yang diberikan oleh Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pejabat dari Bappeda bahwa pimpinan daerah memiliki tingkat legalitas yang tinggi karena dipilih secara langsung melalui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang merupakan mandat untuk mengelola Pemerintahan Provinsi.

2.2.3.1.3.3 Kredibilitas Pimpinan

Kredibilitas seorang pemimpin adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Setiap produk kebijakan yang dianggap kredibel adalah yang dihasilkan oleh para pemimpin yang kredibel pula. Oleh karena itu mengelola kebijakan selalu terkait langsung dengan kredibilitas pembuatnya. Kredibilitas benar-benar dipertaruhkan dalam pengelolaan kebijakan. Kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas tentu menghadapi kompleksitas dalam perumusannya karena banyak kepentingan yang harus semaksimal mungkin diakomodir dan mengurangi semaksimal mungkin dampak negatif yang ditimbulkan.

Pimpinan OPD mampu menterjemahkan kebijakan *link and match* tetapi perlu kesiapan dan koordinasi yang kuat antar pemangku kebijakan untuk bisa mendorong IDUKA bersinergi dengan sekolah. (wawancara tanggal 8 desember 2023)

Pendapat lain dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

Belum 100 %, mampu menterjemahkan, ini bisa dilihat pada lamanya proses administrasi kedinasan, hanya saja sudah banyak Satuan Pendidikan pelaksanaan IKM secara mandiri yang melakukan penyelarasan kurikulum dengan IDUKA, melakukan reskilling dan upskilling SDM satuan pendidikan, dan memberikan kesempatan semaksimal mungkin kepada siswa untuk meningkatkan kompetensi

pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai kebutuhan IDUKA melalui prakerin, pemagangan pembiasaan budaya kerja lainnya. Hal tersebut bertujuan agar alumni siap kerja sesuai permintaan/persyaratan IDUKA dan mampu bersaing dengan masyarakat lainnya di Kabupaten Tangerang. (wawancara pada tanggal 9 desember 2023)

Hal senada dikemukakan oleh informan dari SMK:

Masih harus dapat menerjemahkan dengan baik, dan retorika SMK di Banten penyumbang pengangguran tertinggi harus dilihat dari berbagai sudut, tidak semua lulusan SMK bekerja, mereka ada yg melanjutkan bahkan berwirausaha. Seharusnya pimpinan OPD harus mampu menterjemahkan kebijakan tersebut agar program pemerintah dalam mengurangi dampak pengangguran dapat berjalan efektif. (wawancara pada tanggal 9 desember 2023)

Berdasarkan identifikasi wawancara yang sudah dibuat, tampak jelas bahwa alasan utama mengapa pimpinan daerah memiliki kredibilitas yang begitu kuat untuk membuat kebijakan *link and match* karena dilatarbelakangi oleh kondisi masih banyaknya angka pengangguran sehingga berkesan lulusan SMK menjadi lumbung pengangguran. Pemerintah sebagai regulator, sebagai fasilitator, sebagai katalisator harus mengutamakan sektor pendidikan karena pendidikan itu penting, kompetensi antar bangsa tanpa didukung pendidikan yang berkualitas adalah sesuatu yang mustahil.

Apa yang menjadi alasan mengapa pimpinan daerah menggulirkan kebijakan *link and match* SMK dengan Industri tidak hanya mendapatkan dukungan dari para pejabat, industri, kepala sekolah namun juga masyarakat yang melalui komite sekolah. Berdasarkan identifikasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagian besar stakeholder mendukung penuh program kebijakan *link and match* SMK dengan industri ini. Harapan dari para pemangku kepentingan adalah pemerintah Provinsi Banten dapat menjaga komitmen melalui program *link and*

match SMK dengan industri ini tetap memenuhi apa yang menjadi kebutuhan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Vokasi yang pada akhirnya mampu berperan serta menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan siap diserap oleh dunia industri.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, strategi yang efektif dalam upaya Implementasi Kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang hanya dapat diwujudkan dengan strategi implementasi kebijakan yang ideal.

2.2.3.2 Analisis SWOT Strategi Implementasi Kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang

Implementasi Kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman atau dengan istilah SWOT analisis (*Strenghts, Weaknes, Opportunities and Treath*). Analisis SWOT adalah analisis kondisis internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi perubahan dalam organisasi. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threaths*).

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/ancaman, sebagai berikut:

Berdasarkan uraian gambaran keadaan Kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang, selanjutnya, oleh peneliti di integrasikan kedalam gambar analisis kuadran SWOT, dengan langkah-langkah sebagai berikut

Sebagai bahan untuk perencanaan strategis kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang dapat memanfaatkan dari hasil analisis SWOT dengan menilai ke-dalam/internal dan keluar/Eksternal organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang khususnya terkait dengan *Link and match* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah ke 1

Faktor Eksternal dan Faktor Internal yang mempengaruhi *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Setelah menyajikan faktor faktor internal strategi kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang dalam bentuk matriks, kemudian dipaparkan juga faktor faktor eksternal strategi kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang, sebagai berikut

Berdasarkan tabel Kuadran Analisis SWOT yang menggambarkan kondisi internal dan eksternal kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang, selanjutnya diketahui

pertemuan sel dari elemen peluang (O) dengan Ancaman (T). Dilanjutkan dengan menggambarkan elemen Kekuatan yaitu pertemuan antara (*Comparative Advantage*) dan (*Strategy Mobilization*), yaitu Kekuatan (S) dan Peluang (O) dengan sel Kekuatan (S) dan Ancaman (T) sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Berdasarkan elemen Kekuatan yaitu pertemuan antara (*Comparative Advantage*) dan (*Strategy Mobilization*), sebagaimana tergambar pada tabel di atas, selanjutnya digambarkan elemen Kelemahan, yaitu pada tabel 21, yaitu (*Divestment/ Investment*), (*Damage Control*) pertemuan antara sel Kelemahan (W) dengan Peluang (O) dengan Kelemahan (O) dan Ancaman (T), yaitu sebagai berikut;

Berdasarkan analisis dengan menggunakan analisis SWOT dapat dijelaskan bahwa implementasi Kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang memiliki peluang yang sangat besar, seperti yang tercantum pada table di atas.

Upaya mewujudkan keterkaitan dan keselarasan SMK dan industri berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada akan mendorong tingginya tingkat ancaman bilaman upaya implementasi kebijakan tidak memperhatikan seperti apaya yang dikemukakan tentang implementasi kebijakan menurut Goggins (1990) dengan tiga aspek implementasi kebijakan yang terdiri dari isi pesan kebijakan, bentuk pesan dan persepsi terhadap pimpinan.

⁵ Berdasarkan analisis pembahasan hasil penelitian dengan memperhatikan kekuatan dan ancaman, serta peluang dan ancaman didalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi dapat menggunakan strategi Berdasarkan analisis dengan menggunakan analisis SWOT dapat dijelaskan bahwa implementasi Kebijakan ⁹ *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang memiliki peluang yang sangat besar, seperti yang tercantum pada table di atas.

Upaya mewujudkan link and maatch SMK dengan Industri berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada akan mendorong tingginya tingkat ancaman bilaman upaya implementasi kebijakan tidak memperhatikan seperti apaya yang dikemukakan tentang implementasi kebijakan menurut Goggins (1990) dengan enam aspek implementasi kebijakan yang terdiri dari aspek isi pesan, bentuk pesan dan persepsi terhadap pimpinan.

⁵ Berdasarkan analisis pembahasan hasil penelitian dengan memperhatikan kekuatan dan ancaman, serta peluang dan ancaman didalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi dapat menggunakan strategi *Comparative Advantage*: yaitu ⁵ Mengoptimalkan Kekuatan (S), dan mendapatkan Peluang (O), *Mobilization*: Menggunakan Kekuatan (S) yang dimiliki, dan mengatasi Ancaman (T), ⁵ *Investment/ Investment*: Mengatasi Kelemahan (W), dan pemanfaatan Peluang (O), dan *Damage Control*: Mengatasi Kelemahan (W) dan mengatasi Ancaman (T).

Langkah ke II

¹⁰ Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor faktor internal dan eksternal terhadap implementasi Kebijakan ⁹ *Link and match* Sekolah Menengah

Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang, peneliti menggunakan Riset SWOT. Menurut Rangkuti (2008) riset SWOT sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan menganalisis dan mengklasifikasikan secara kuantitatif faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang.

Hasil riset SWOT adalah berupa angka. Setiap pertanyaan yang dijawab oleh informan dari faktor internal dan eksternal dalam bentuk skala akan di hitung sehingga diperoleh satu angka tertentu. Skala yang digunakan adalah antara 1 – 4. Untuk nilai faktor internal (*weakness* dan *strength*) nilai 1 berarti rendah dan 4 berarti tinggi. Sedangkan untuk faktor eksternal (*opportunities* dan *threath*) nilai 1 berarti tinggi dan 4 berarti rendah.

Karena faktor faktor tersebut dihitung dengan menggunakan angka, maka untuk mempermudah proses perhitungan, peneliti menentukan interval. Penetapan interval dihasilkan sebagai berikut:

Dengan menggunakan panjang kelas 0,75 dan skor terendah adalah 1, maka dapat dibuat kriteria interval sebagai berikut:

a) Perhitungan Faktor Internal

¹⁰ Berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata kekuatan yang dimiliki Kebijakan ⁹ *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang ¹⁰ adalah sebesar **3,38** pada kategori **Tinggi**. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten telah dioptimalkan secara maksimal sehingga dianggap mampu untuk mendukung Kebijakan ⁹ *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang kedepannya.

¹⁰ Kemudian berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata kelemahan yang dimiliki ⁹ *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang adalah sebesar **1,9** pada kategori **Cukup Rendah**. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelemahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten cukup rendah, dan tidak signifikan untuk mempengaruhi keberhasilan kebijakan *link and match*.

b) Perhitungan Faktor Eksternal

Berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata peluang yang dimiliki Kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang adalah sebesar **3,09** pada kategori **Cukup Tinggi**. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang keberhasilan implementasi kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang terlihat jelas, namun tidak maksimal dimanfaatkan oleh pelaksana kebijakan.

Kemudian berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata ancaman yang dimiliki Kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang adalah sebesar **2,7** pada kategori **Tinggi**. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program *link and match* di Kabupaten Tangerang mengalami kendala yang cukup berat, sehingga berpotensi menghambat keberhasilan implementasinya.

Langkah ke III

Sebelum menyusun matriks SWOT, terlebih dahulu dilakukan analisis faktor strategi internal atau IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan analisis faktor strategi eksternal atau EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*). Analisis ini dilakukan dengan cara memberikan bobot dan rating pada setiap faktor faktor strategi.

⁵ Berdasarkan pada hasil pembobotan dan rating yang dilakukan melalui analisis SWOT IFAS dan EFAS, maka dapat diperoleh total nilai akhir dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

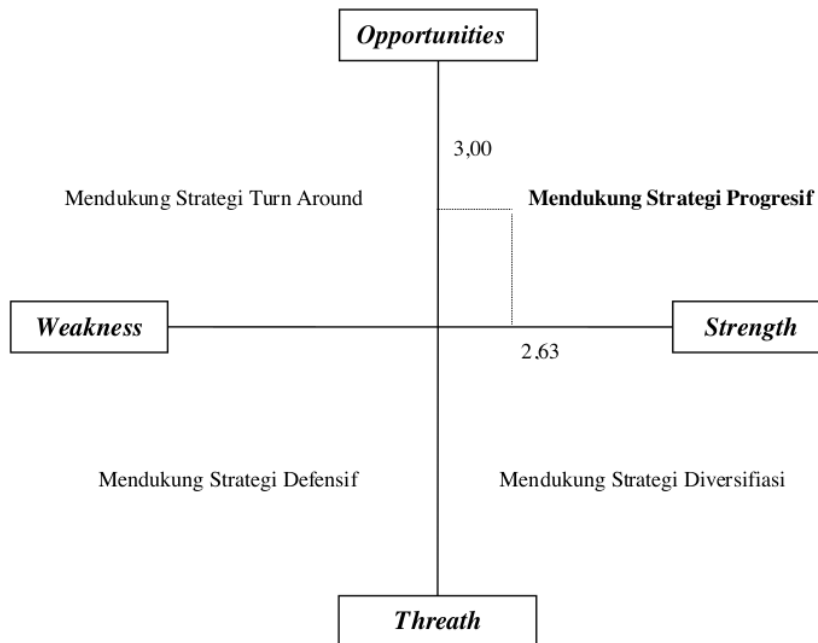
Tabel 28
Rekapitulasi Hasil Perhitungan IFAS dan EFAS

No	Uraian	Total Nilai
1	Faktor Internal	2,63
2	Faktor Eksternal	3,00

Sumber: di olah oleh peneliti (2023)

Langkah ke IV

⁵ Perolehan hasil perhitungan sebelumnya kemudian digunakan sebagai acuan pembentukan analisis SWOT untuk melihat posisi potensi kebijakan ⁹ *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang yang dituangkan dalam diagram berikut:



Gambar 16
Diagram Analisis SWOT Strategi Implementasi Kebijakan *Link and match*
Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja
Di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan diagram analisis SWOT di atas menunjukkan bahwa kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang berada pada kuadran I pada situasi yang kurang menguntungkan dan juga sarat akan ancaman. Strategi yang harus diterapkan dalam kuadran ini adalah mendukung strategi progresif.

Strategi Implementasi Kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang menurut hasil penelitian secara kualitatif pada intinya belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga belum mampu mewujudkan tujuan kebijakan yakni keterserapan lulusan SMK yang

tinggi sehingga dapat meminimalisir angka pengangguran di Kabupaten Tangerang, padahal kebijakan *link and match* itu sangat penting dan perannya besar.

Strategi Implementasi *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang itu sendiri merupakan upaya yang penting untuk dilakukan karena terjadi ketidakefektifan kinerja kebijakan yang berakibat pada kinerja daerah khususnya dalam angka pengangguran yang semakin meningkat. Oleh karena itu, mengupayakan strategi implementasi kebijakan menjadi suatu yang urgent untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang dapat diketahui melalui penyerapan tenaga kerja lulusan SMK yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah dapat efektif dalam mewujudkan penyerapan tenaga kerja SMK melalui pematapan *link and match* lulusan SMK dengan industri yang ditentukan oleh faktor internal dan eksternal kebijakan.

Faktor pertama oleh faktor internal (*Strenght and weakness*), yakni bahwa *Strenght* merupakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi dan kebijakan. Kekuatan ini biasanya berupa tersedianya tenaga kerja yang memiliki kecakapan teknologi, sarana yang mutakhir serta sistem manajemen yang handal. Sedangkan *Weakness*, yaitu faktor yang ada di dalam organisasi dan kebijakan yang harus dikelola dengan baik agar dapat meminimalisasi kelemahan organisasi terutama kelemahan dan hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan *link and match* oleh pemerintah.

Faktor kedua, oleh faktor eksternal (*opportunities and threats*). *Opportunities* merupakan faktor yang sangat menguntungkan karena memiliki

peluang atau kesempatan dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi atau kebijakan, yaitu dengan Strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan secara optimal peluang atau kekuatan ini untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pada faktor *Threats* yaitu ancaman yang berasal dari luar. Ancaman ini bisa berupa dukungan politik pemerintah, kebijakan dari parlemen (DPR), pesaing, perkembangan teknologi, kebutuhan lingkungan masyarakat dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Strategi progresif yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan kebijakan *Link and match* Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Industri Dan Dunia Kerja Di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan terhadap program *Link and match* yang telah dilakukan sebelumnya;
2. Memaksimalkan peran masing masing stakeholder dalam program *link and match* antara SMK dengan industri di Kabupaten Tangerang;
3. Memaksimalkan potensi kuantitas BKK untuk menjaring kerjasama dengan industri sebanyak banyaknya. Jumlah BKK yang tinggi harus menjadi jaminan MoU dengan industri yang tinggi juga. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap unit unit BKK agar handal dalam menjaring kerjasama;
4. Memaksimalkan sinkronisasi kurikulum yang telah ada;
5. Memaksimalkan program praktek kerja industri dan magang;
6. Memaksimalkan pelatihan siswa dan guru oleh unsur industri;
7. Memaksimalkan guru tamu dari industri minimal 50 jam

pembelajaran/semester;

8. Mengoptimalkan peran industri dalam membantu sekolah, baik bantuan peralatan, bantuan Gedung dan lainnya dalam mendukung kualitas SMK.

Sementara itu penggunaan teori Goggins dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa proses kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kerjanya berdasarkan variable; (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Variable dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dimata daerah, maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui; (1) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan, (2) bentuk kebijakan yang memuat antara lain; kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan, dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu untuk mengetahui variable kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan tentang penggunaan teori Goggin sebagai pisau analisis terhadap kebijakan *link and match* akan berhasil dengan baik jika kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dari tataran pusat, daerah dan stakeholder lainnya jika diibangi dengan sumberdaya yang tinggi, serta dengan kredibilitas yang kuat. Strategi yang telah dihasilkan dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan IDUKA sebagaimana diuraikan di atas, hanya dapat terwujud dan berhasil apabila di selenggarakan dengan sinergitas antar *stakeholder* yang terlibat. Kritik akan teori Goggin pada aplikasinya dalam analisa penelitian ini adalah terletak pada sinergitas antar *stakeholders*, yang sulit terlaksana apabila keseriusan implementasi kebijakan ini sangat rendah.

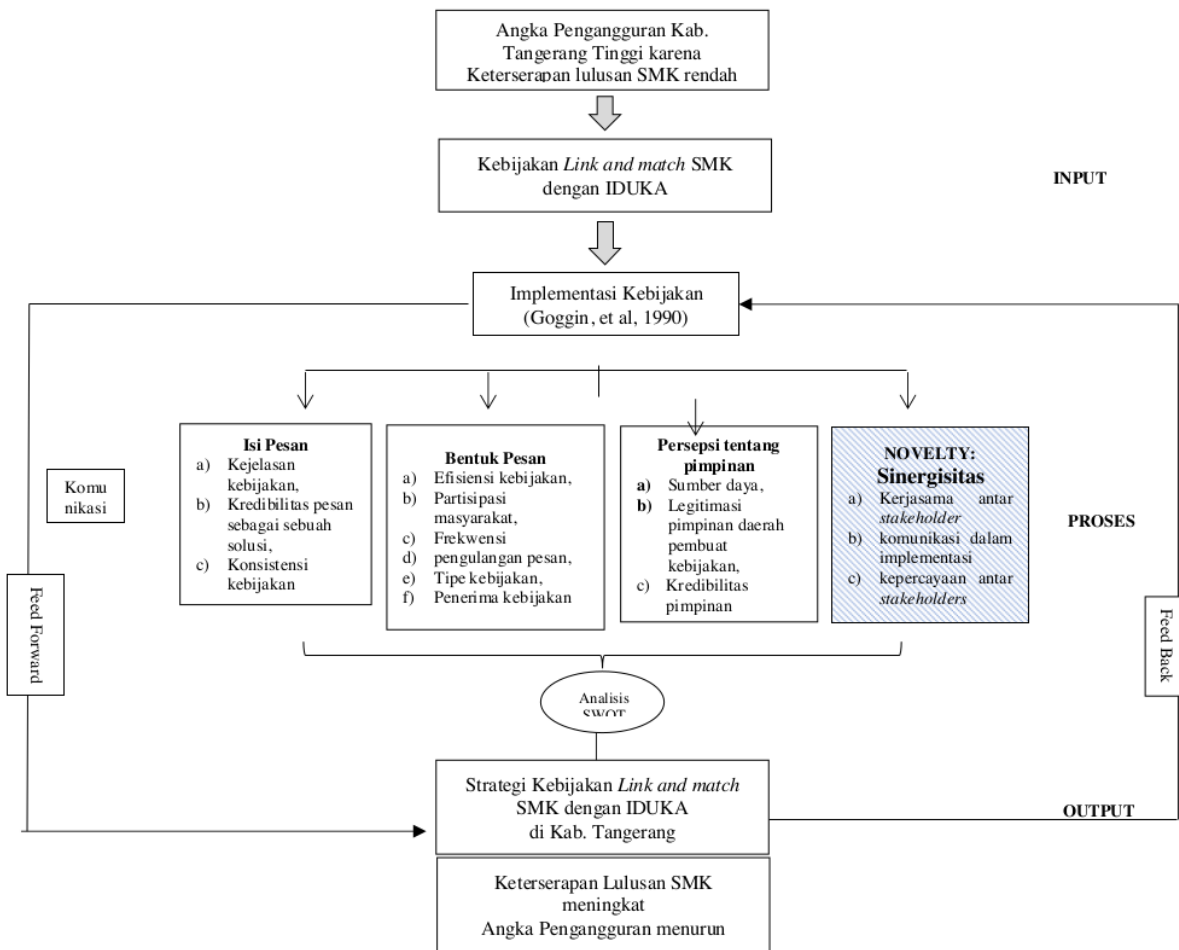
Hasil penelitian di atas peneliti dapat simpulkan bahwa teori Gogin yang digunakan sebagai landasan teori dan pisau analisis, masih relevan dalam menggali dan menganalisis akar masalah implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan IDUKA di Kabupaten Tangerang, bahkan dapat menjadi landasan dalam penentuan strategi dengan teknik analisis SWOT. Namun demikian penelitian ini juga memunculkan temuan bahwa teori ini juga mempunyai kelemahan dalam kemampuan nya mendalami masalah implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan IDUKA di Kabupaten Tangerang, untuk menggenapi kelemahan tersebut maka perlu untuk memodifikasi teori Gogin tersebut, agar dapat lebih komprehensif dalam menganalisis implementasi kebijakan publik secara umum.

2.2.4 Pembahasan Hasil Temuan Penelitian (Novelty)

Setelah dilakukan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa teori yang digunakan sebagai dasar teori dan pisau analisis untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini belum sempurna. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Goggin *et al* (1990) memang masih relevan dalam menganalisa masalah implementasi kebijakan dalam *Link and match* SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) di Kabupaten Tangerang, namun setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa masih terdapat satu dimensi yang tidak dibahas secara komprehensif dalam teori tersebut. Dimensi dimaksud adalah dimensi sinergisitas, yang terdiri dari faktor kerjasama, komunikasi dan kepercayaan.

Penggunaan teori tersebut, dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Link and Match sangat relevan, mengingat teori tersebut adalah model komunikasi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yang didistribusikan ke Pemerintah Daerah, instansi vertikal, horizontal, dan instansi diluar Pemerintah (swasta), dan masyarakat. Dalam implementasinya suatu kebijakan didistributifkan oleh pemeritah pusat sampai tataran organisasi yang paling rendah, melalui koordinasi yang efektif, sehingga kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya.

Dari uraian di tersebut, dapat digambarkan tentang paradigma baru implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan Industri dan Dunia Kerja di Kabupaten Tangerang pada Gambar 15.



Sumber: Hasil Penelitian di olah oleh peneliti (2022)

Gambar 17
Paradigma Baru Penelitian

Pada gambar tersebut dapat dikemukakan bahwa angka pengangguran sangat tinggi disebabkan ketersediaan lulusan SMK sangat rendah, hal ini disebabkan karena kompetensi lulusan SMK tidak sesuai dengan kompetensi yang

dipersyaratkan industri dan dunia kerja di Kabupaten Tangerang. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kemitraan yang kuat antara SMK dengan IDUKA melalui kebijakan *link and match*, artinya ada kesesuaian dan keselarasan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Untuk mengimplementasikan kebijakan *link and match* dianalisis dengan teori Goggins dengan dimensi isi pesan, bentuk pesan dan kredibilitas pimpinan. Dengan menggunakan teori tersebut diharapkan keterserapan lulusan SMK semakin tinggi dan angka pengangguran semakin rendah.

Implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri di Kabupaten Tangerang mengacu pada regulasi instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016, Permenperin nomor 3 tahun 2017 tentang Pendidikan Vokasi, Pergub Provinsi Banten nomor 39 tahun 2022 tentang Pendidikan Vokasi, serta Peraturan peraturan daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya memuat tentang Bursa Kerja Khusus (BKK). Dalam regulasi regulasi yang di keluarkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah tersebut, didalamnya mengandung rekomendasi untuk melakukan koordinasi dan kerjasama beberapa satuan dinas, dan institusi sebagaimana teori sinergisitas yang dikemukakan oleh Covey (1998).

Institusi yang terlibat dalam kebijakan *link and match* SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri di Kabupaten Tangerang adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, Dinas Perindustrian, serta Industri / perusahaan sekitar sebagai mitra sekolah.

Melihat banyaknya institusi yang terlibat dalam program kebijakan, maka sinergisitas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana kelemahan yang dialami dalam implementasi kebijakan yang diuraikan dalam bagian pembahasan penelitian, bahwa program kebijakan *Link and match* terkendala pada sinergisitas antar *stakeholders*, mengingat wajib nya keterkaitan antar stakeholder yang harus ada pada penyelarasan antara dunia pendidikan SMK dengan dunia kerja di Industri.

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa perlu adanya sinergisitas dari unsur pendukung pada Program *link and match* guna membangun koordinasi dan kerjasama yang terarah antar *stakeholders* sehingga menghasilkan dukungan maksimal terhadap kesatuan konsep dan meningkatkan keberhasilan *link and match* SMK dengan Dunia Usaha, Dunia / Industri di Kabupaten Tangerang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Pada bagian ini dirumuskan tiga kesimpulan pokok yang dirangkaikan dari penyajian hasil penelitian dan pembahasannya. Tiga kesimpulan pokok yang disajikan merupakan penjelasan terhadap fokus penelitian, yakni implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan IDUKA, penyebab ketidakefektifan implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan IDUKA, dan strategi untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan IDUKA yang sesuai dan dapat diterapkan di Kabupaten Tangerang.

1. Implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan IDUKA di Kabupaten Tangerang belum efektif. Ketidakefektifan tersebut dapat di ketahui dari kondisi keterserapan lulusan SMK oleh industri yang masih rendah, yang mengakibatkan angka pengangguran terdidik di Kabupaten Tangerang masih tinggi. Apabila dilihat dari data eksisting penyelenggaraan Pendidikan SMK di Kabupaten Tangerang dijumpai kolaborasi dan kemitraan sekolah dengan industri masih rendah, hanya terbatas pada penyelenggaraan praktek kerja industri.
2. Ketidakefektifan implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan IDUKA di Kabupaten Tangerang, disebabkan oleh kebijakan yang belum tersosialisasikan dengan baik, keterbatasan jumlah dan mutu Guru produktif,

dan belum terlaksananya sinkronisasi kurikulum SMK dengan Industri untuk setiap kompetensi keahlian di sekolah.

3. Strategi yang paling tepat untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan IDUKA di Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan analisa SWOT dengan memperhatikan isi kebijakan, bentuk kebijakan dan persepsi terhadap pimpinan, dihasilkan strategi dengan menerapkan konsep progresif atau agresif, yakni dengan mengatasi kelemahan faktor internal kebijakan, dan mengatasi tantangan eksternal yang juga besar.

3.2 Saran

3.2.1 Saran Akademis

1. Disaankan kepada peneliti yang akan datang, untuk dapat menganalisa lebih dalam terkait dengan implementasi kebijakan yang ditinjau dari sudut pandang teori lain yang akan dapat menggali lebih banyak masalah pada kebijakan publik.
2. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, baik fokus maupun lokusnya, disarankan kepada peneliti yang akan datang untuk dapat lebih memperluas fokus dan lokus penelitian implementasi kebijakan, agar dapat diperoleh pengayaan terhadap ilmu kebijakan publik. Misalnya dikaitkan dengan pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi.

1.2.2 Saran Pratis

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab lemahnya implementasi kebijakan *link and match* SMK dengan IDUKA di Kabupaten Tangerang adalah kebijakan *link and match* belum tersosialisasikan dengan baik pada sekolah dan industri, pemenuhan guru produktif dari sisi jumlah dan mutu sesuai kompetensi

keahlian belum tercapai dengan baik pada sekolah negeri dan swasta, dan sinkronisasi kurikulum sekolah dengan industri belum terlaksana dengan baik, disebabkan sulitnya sekolah untuk berkolaborasi dengan industri. Oleh karena itu, disarankan kepada Pemerintah Provinsi Banten sebagai stakeholder dan penanggungjawab program *link and match* SMK dengan IDUKA di Kabupaten Tangerang, untuk lebih menguatkan rencana sosialisasi kebijakan *link and match*, menganggarkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik agar lebih profesional dalam pengajaran SMK dengan melibatkan unsur industri, dan melakukan evaluasi untuk mengelola dan merumuskan kurikulum SMK lebih sinkron dengan kebutuhan industri.

2. Pemerintah harus menambah anggaran untuk program *link and match* SMK dengan IDUKA, perencanaan pembiayaan juga harus melibatkan seluruh stakeholder kebijakan *link and match* SMK dengan IDUKA termasuk pemerintah Kabupaten/Kota, agar pelaksanaan *link and match* SMK dengan IDUKA dapat tercapai dengan maksimal.

Disertasi Revisi Iman Sutarya DIS

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	5%
2	widyasari-press.com Internet Source	4%
3	docplayer.info Internet Source	4%
4	media.neliti.com Internet Source	3%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
6	www.kompasiana.com Internet Source	2%
7	ojs.unpkediri.ac.id Internet Source	2%
8	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	2%
9	eprints.uny.ac.id Internet Source	2%

10 repository.ummy.ac.id 1 %
Internet Source

11 www.stiacimahi.ac.id 1 %
Internet Source

12 repository.umsu.ac.id 1 %
Internet Source

13 jurnal.sar.ac.id 1 %
Internet Source

14 www.bps.go.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On